

SKRIPSI

ANALISIS STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH PP NO. 71 TAHUN 2010 BERBASIS AKRUAL TERHADAP PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) MAKASSAR



**ANDI RIDA SYAHRAIDA RAMADANI
1710321119**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU – ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2021**

SKRIPSI

ANALISIS STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH PP NO. 71 TAHUN 2010 BERBASIS AKRUAL TERHADAP PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) MAKASSAR



Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi

**ANDI RIDA SYAHRAIDA RAMADANI
1710321119**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU – ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2021**

SKRIPSI

ANALISIS STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PP NO. 71 TAHUN 2010 BERBASIS AKRUAL TERHADAP PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) MAKASSAR

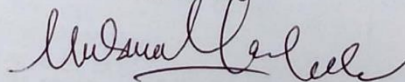
disusun dan diajukan oleh

ANDI RIDA SYAHRAIDA RAMADANI
1710321119

telah diperiksa dan telah diuji

Makassar, 08 September 2021

Pembimbing



Muhammad Cahyadi, SE, M.Si., AAAIJ, QIP
NIDN: 0911077502

Ketua Program Studi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial
Universitas Fajar



Yasmi, S.E., M.Si., Ak., CA., CTA., ACPA
NIDN: 0925107801

SKRIPSI

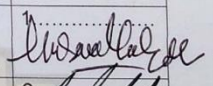
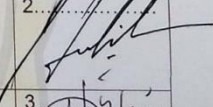
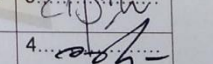
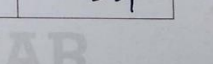
ANALISIS STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
PP NO. 71 TAHUN 2010 BERBASIS AKRUAL
TERHADAP PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI
(Tempat Pemeriksaan Imigrasi)
MAKASSAR

disusun dan diajukan oleh

ANDI RIDA SYAHRAIDA RAMADANI
1710321119

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **08 September 2021** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Dewan Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Muhammad Cahyadi, SE, M.Si., AAAIJ, QIP NIDN: 0911077502	Ketua	
2.	Dr. Habib Muhammad Shahib, SE., M.Si., Ak., CA., ACPA., CSRS., CSRA., CLI NIDN: 0930099101	Sekretaris	2. 
3.	Dinar, S.E., M.Si., CTA., ACPA NIDN: 0916058001	Anggota	3. 
4.	Dr. Ir. Mujahid, S.E., MM NIDN: 0923106801	Eksternal	4. 

Dekan Fakultas Ekonomi
dan Ilmu-ilmu Sosial
Universitas Fajar



Dr. Yusmanizar S. Sos., M.I.Kom
NIDN: 0925096902

Ketua Program Studi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial
Universitas Fajar



Yasmi, S.E., M.Si., Ak., CA., CTA., ACPA
NIDN. 0925107801

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Andi Rida Syahraida Ramadani

NIM : 1710321119

Program Studi : Akuntansi S1

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **Analisis Standar Akuntansi Pemerintahan PP No. 71 Tahun 2010 Berbasis AkruaI Terhadap Penyajian Laporan Keuangan Pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) Makassar** adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 08 September 2021

Yang membuat pernyataan,



Andi Rida Syahraida Ramadani

Downloaded with CamScanner

PRAKATA

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kesabaran, kekuatan, rahmat dan hidayahnya sehingga penulisan Proposal Skripsi yang berjudul **“Analisis Standar Akuntansi Pemerintah PP No. 71 Tahun 2010 Berbasis Akrua Terhadap Penyajian Laporan Keuangan Pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) Makassar”** dapat diselesaikan. Shalawat serta salam tak lupa dikirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat – sahabatnya.

Skripsi ini adalah syarat untuk menyelesaikan studi strata 1 dan untuk mendapatkan gelar Sarjana Akuntansi pada Jurusan Akuntansi di Universitas Fajar Makassar.

Dalam penyusunan Skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta motivasi dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih sebesar – besarnya kepada kedua orang tua penulis, ayahanda Andi Syahrir dan ibunda Hj. Nurhaeda, SH. Tidak lupa juga penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada Dosen sekaligus pembimbing proposal skripsi bapak Muhammad Cahyadi, SE., M.Si., AAAIJ., QIP atas arahan dan bimbingannya kepada penulis dalam menyusun laporan ini.

Selain itu, penulis juga tidak lupa untuk mengucapkan terma kasih kepada berbagai pihak, diantaranya:

1. Bapak Dr. Mulyadi Hamid, SE., M. Si selaku Rektor Universitas Fajar.
2. Ibu Dr. Hj. Yusmanizar, S. Sos., M. IKom selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial Universitas Fajar.
3. Ibu Yasmi, S.E., M.Si., Ak., CA., CTA., ACPA selaku Ketua Prodi Akuntansi S1 Universitas Fajar Makassar.
4. Bapak Teri, S.E., M.Si., Ak., CA., CTA., CPA., CHRO selaku Penasihat Akademik.
5. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial Universitas Fajar yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan yang bermanfaat.
6. Seluruh staf akademik, dan tata usaha Universitas Fajar.
7. Pegawai kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar Ibu Rostati, Ibu Uche, Ibu Vita, dan Pak Ashir yang telah membantu dan membimbing penulis dalam menyusun laporan penelitian ini.
8. Semua keluarga yang telah ikut membantu dan memberi motivasi terutama kakak penulis tercinta Andi Resky Tenri Wala, Andi Nurhasiyah Tenri Maneng, Andi Mayasari Tenri Pada.

9. Kepada teman - teman penulis semasa SMA hingga sekarang yang banyak memberikan masukan dan semangat kepada penulis Manda, Mayang, Irna Nurul, Pahira, Wulan, Nori, Nisa, dan Lilis
10. Kepada sahabat penulis yang tidak lelah memberikan semangat Silvy, Dian, dan Afifa.
11. Kepada seluruh teman - teman angkatan 2017 terutama Erni, Lisa, Cittrah, Dewi, Radika, Dillah, Ainun, Hikmah, As'ad, Paim, Callu yang selalu memberikan energi positif
12. Kepada seseorang yang lebih dahulu menghadap kepada sang ilahi, Alm Wahyudi Damansyah terima kasih atas segalanya.
13. Dan kepada semua teman – teman dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah ikut memberikan bantuan dan dukungan.
14. Kepada member NCT yang terus memberikan semangat dari lagu – lagunya.

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang membangun diharapkan demi menyempurnakan Proposal Skripsi ini.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 08 Juni 2021

Penulis

ABSTRAK

ANALISIS STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH PP NO. 71 TAHUN 2010 BERBASIS AKRUAL TERHADAP PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) MAKASSAR

**Andi Rida Syahraida Ramadani
Muhammad Cahyadi**

Penelitian ini dilaksanakan pada kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar yang merupakan salah satu entitas akuntansi dibawah Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penyajian laporan keuangan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah PP. No.71 Tahun 2010 berbasis akrual serta faktor pendukung dalam penyajian laporan keuangannya. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif komparatif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada laporan keuangan yang disajikan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar telah disusun sesuai PP No. 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Meskipun ada perbedaan pada laporan – laporan yang disajikan dalam laporan keuangannya, namun secara keseluruhan tetap mengikuti aturan yang ditetapkan. Dalam keberhasilan penyajian laporan keuangan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar dilihat dari faktor sumber daya manusia serta perangkat teknis pendukung untuk menciptakan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Kata Kunci: PP No. 71 Tahun 2010, Penyajian Laporan Keuangan Berbasis Akrual, Sumber Daya Manusia dan Perangkat Teknis Penyusunan Laporan Keuangan

ABSTRACT

ANALYSIS OF GOVERNMENT ACCOUNTING STANDARDS GOVERNMENT REGULATION NO. 71 YEAR 2010 ACCRUAL BASED ON THE PRESENTATION OF FINANCIAL STATEMENTS AT THE IMMIGRATION OFFICE CLASS I TPI (Immigration Checkpoint) MAKASSAR

**Andi Rida Syahraida Ramadani
Muhammad Cahyadi**

This research was conducted at the Immigration Office Class I Immigration Checkpoint Makassar which is one of the accounting entities under the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia. This study aims to determine and analyze the presentation of the financial statements of the Immigration Office Class I TPI Makassar in accordance with government accounting standards Government Regulation no. 71 of 2010 based on accruals and supporting factors in the presentation of its financial statements. The research approach used is a comparative descriptive method with a qualitative approach. The results of this study indicate that the financial statements presented by the Immigration Office Class I TPI Makassar have been prepared in accordance with PP. 71 of 2010 concerning accrual-based government accounting standards. Although there are differences in the reports presented in the financial statements, overall they still follow the established rules. In the successful presentation of financial reports at the Immigration Office Class I TPI Makassar, it is seen from the human resource factor and supporting technical tools to create transparent and accountable financial reports.

Keywords: *Government Regulation no. 71 of 2010, Presentation of Accrual-Based Financial Statements, Human Resources and Technical Tools for Preparation of Financial Statements*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Fokus Penelitian	6
1.3 Rumusan Masalah	6
1.4 Tujuan Penelitian	7
1.5 Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Teori Kepatuhan (<i>Compliance Theory</i>)	9
2.2 Teori Entitas (<i>Entity Theory</i>)	9
2.3 Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	10
2.3.1 Pengertian Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	11
2.3.2 Pentingnya Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).....	12
2.3.3 Tujuan Standar Akuntansi Pemerintah	13
2.3.4 Manfaat Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).....	13
2.4 Laporan Keuangan di Pemerintah.....	14
2.5 Perbedaan PP No. 24 Tahun 2005 dan PP No. 71 Tahun 2010	15

2.6	Faktor Pendukung Dalam Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI Pada Penyajian Laporan Keuangan	18
2.7	Tinjauan Empiris	20
2.8	Kerangka Pikir	22
BAB III METODE PENELITIAN		23
3.1	Rancangan Penelitian.....	23
3.2	Tempat dan Waktu Penelitian	23
3.3	Sumber Data	23
3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	24
3.5	Analisis Data.....	25
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		26
4.1	Gambaran Umum Perusahaan	26
4.2	Hasil Penelitian Dan Pembahasan.....	28
4.2.1	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah PP No. 71 Tahun 2010 Berbasis AkruaI	29
4.2.1.1	Laporan Realisasi Anggaran (LRA).....	30
4.2.1.2	Neraca	33
4.2.1.3	Laporan Operasional.....	37
4.2.1.4	Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).....	40
4.2.1.5	Catatan atas Laporan Keuangan	42
4.2.2	Faktor – Faktor Pendukung Penerapan PP. No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI Dalam Penyajian Laporan Keuangan	45
BAB V PENUTUP		55
5.1	Kesimpulan	55
5.2	Saran	56
DAFTAR PUSTAKA.....		57
DAFTAR LAMPIRAN		60

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Perbedaan PP No. 24 Tahun 2005 Dan PP No. 71 Tahun 2010.....	16
2.2 Penelitian Terdahulu.....	21
4.1 Penyajian Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2020 Dan 2019.....	31
4.2 Penyajian Neraca Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2020 Dan 2019.....	34
4.3 Penyajian Laporan Operasional Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2020 2019.....	38
4.4 Penyajian Laporan Perubahan Ekuitas Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2020 Dan 2019.....	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Pemikiran.....	22
4.1 Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Makassar.....	27
4.2 Catatan atas Laporan Keuangan.....	43
4.3 Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA).....	47
4.4 SAKTI (Sistem Akuntansi Tingkat Instansi).....	49
4.5 Aplikasi SAS (Satuan Kerja Pembendaharaan).....	50
4.6 Aplikasi Web e-Rekon & LK.....	52

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
Pertanyaan	60
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2020 Dan 2019.....	61
Neraca Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2020 Dan 2019.....	62
Laporan Operasional Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2020 Dan 2019.....	63
Laporan Perubahan Ekuitas Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2020 Dan 2019.....	65

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era reformasi yang sampai saat ini masih terus berlanjut tidak hanya di bidang politik tetapi berpengaruh juga pada perkembangan bidang keuangan. Sejak peristiwa krisis ekonomi yang melanda Indonesia di tahun 1998, pada saat itu pemerintah terus melakukan perombakan pada tata pengelolaan keuangan dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Dalam menciptakan proses tata kelola pemerintah yang baik (*Good Corporate Governance*) di Indonesia, pemerintah melakukan peningkatan terhadap keterbukaan dan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan negara, ditandai dengan adanya perkembangan dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah.

Untuk itu, pemerintah Indonesia terus melakukan perubahan baik itu usaha yang berguna dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas sehingga kedepannya akan lebih memberikan kredibilitas yang cukup baik. Olehnya itu diperlukan transparansi dalam sistem pemerintah akibat terjadinya peningkatan pada era reformasi hingga sekarang. Pemerintah pusat memberikan amanat kepada pemerintah daerah dalam upaya mengembangkan dan membangun potensi sumber daya yang ada di daerahnya. Selanjutnya, pemerintah mengeluarkan Undang – undang No. 22 Tahun 1999 untuk memperkuat dengan meningkatkan pengelolaan keuangan daerah, dan pemerintah juga mengeluarkan Undang – undang No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Pada pengelolaan keuangan pemerintah daerah terdapat pada Undang – undang No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, Undang – undang No. 1 Tahun 2004 tentang

perbendaharaan negara dan Undang – undang No. 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

Salah satu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah merupakan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dalam memiliki peran dalam aturan dan prinsip yang diperuntukan untuk menyusun laporan keuangan. Olehnya itu akuntansi pemerintah ini memiliki tujuan yaitu memberitahukan cara bagaimana dalam melakukan penyusunan laporan keuangan sehingga dapat dipertanggungjawabkan terhadap pelaksanaan dari APBN/APBD yang berguna untuk mengupayakan dalam meningkatkan akuntabilitas, manajemen, serta transparansi pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun daerah. Standar akuntansi pemerintah telah dibuat oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah dalam menetapkan Peraturan Pemerintah setelah dipertimbangkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Oleh karena itu, dalam menyusun laporan keuangan pemerintah harus mengacu pada standar akuntansi yang berlaku.

Kebijakan yang diterapkan sampai saat ini adalah menentukan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual dalam PP No. 71 Tahun 2010 sebagai pengganti dari PP No. 24 Tahun 2005 yang bersifat sementara. Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 hal utama yang timbul dengan adanya pergantian tersebut merupakan sebuah Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual dimana didalamnya dinyatakan pendapatan, aset, beban utang, serta ekuitas pada suatu laporan yang berbasis keuangan. Dikutip dari peneliti terdahulu yaitu Riri (2015) mengatakan bahwa akuntansi basis kas memiliki kelebihan yaitu sederhana dalam penerapannya dan juga mudah untuk dipahami, namun mempunyai berbagai kekurangan yaitu kurang

informative karena hanya memberikan informasi tentang penerimaan, pengeluaran, dan saldo kas, dan tidak memberikan informasi tentang aset dan kewajiban. Olehnya itu, pelaporan pelaksanaan anggaran APBN/APBD yang berdasarkan akrual diantaranya mengakui belanja, pendapatan, dan pembiayaan semuanya itu telah memiliki kekuatan hukum.

Seluruh instansi pemerintah harus mematuhi Peraturan Pemerintah Indonesia yang mengharuskan untuk menetapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual (*accrual basis*). Hal ini sejalan dengan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat yang di atur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225/PMK.05/2016 tentang penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada pemerintah pusat. Penggunaan akuntansi berbasis akrual merupakan suatu misi bagi seluruh pihak yang menjalankan sistem akuntansi dalam pelaporan keuangan pemerintah. Sistem akuntansi ini erat kaitannya dengan aktivitas dalam melakukan penyusunan laporan keuangan yang secara langsung dikelola oleh instansi pemerintah yang menjadi suatu bentuk pertanggung-jawaban atas pelaksanaan APBN berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Untuk melakukan penyusunan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual dilaksanakan dengan menyusun Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) yang berbasis akrual kas secara keseluruhan yang dilakukan sejak awal dan melakukan menyesuaikan berbasis kas menuju akrual menjadi berbasis akrual dengan referensi *International Public Sektor Accounting Standards (IPSAS), Government*

Finance Statistics (GFS), dan *Governmental Accounting Standards Board (GASB)* yang telah bertaraf internasional.

Dalam studi yang dilakukan oleh *International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB, 2011)* mengemukakan hasil bermanfaat dari informasi yang tersaji dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual memungkinkan *stakeholder* menentukan akuntabilitas dalam mengelola sumber daya dan menilai kinerja, arus kas, dan posisi keuangan. yang menjadi pokok utama terbentuknya akuntansi pemerintah berbasis akrual yaitu dengan cara menciptakan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan serta andal dalam akuntansi yang menjadi tantangan dan menjadi kunci utama dalam penerapan standar akuntansi tersebut. Olehnya itu pemerintah memiliki peranan penting dalam penyusunan perencanaan yang dilakukan secara teliti dan berguna untuk menentukan sumber daya manusia dalam akuntansi pemerintah. dengan menggunakan sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual ini merupakan sebuah cara yang saling berhubungan serta memberikan hasil dimana tidak dapat diketahui secara langsung dengan waktu singkat. Namun, dalam penggunaan akuntansi berbasis akrual juga memiliki berbagai kendala dalam hal penilaian, pengakuan, pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas.

Penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual harus didukung dengan sistem akuntansi yang baik dan tepat. Selain dari informasi akuntansi yang telah memenuhi penerapan akuntansi basis akrual, komitmen dari organisasi/instansi juga memiliki peran penting dalam mencapai tujuan. Dalam menjalankan sistem akuntansi yang basis akrual perlu adanya komitmen, identifikasi masalah selama proses perubahan, dan mengubah budaya organisasi (Mehrolhassani et al., 2015).

Dalam mendukung penerapannya, dilakukannya pemeriksaan kinerja untuk menilai efektivitas dalam upaya mengimplementasikan standar akuntansi pemerintah bersifat akrual dengan cara menggunakan tiga indikator, antara lain komitmen atas regulasi dan kebijakan, pengelolaan teknologi informasi, dan sumber daya manusia pengelola keuangan. Dalam hal ini penelitian ini bermanfaat untuk memberikan gambaran terhadap pengaruh serta faktor – faktor atas implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual terhadap laporan keuangan yang berbasis akrual.

Didapatkan pada peneliti terdahulu yang dilakukan oleh Intan dan Putra (2017) serta penelitian yang dilakukan oleh Rizki (2019) penerapan akuntansi basis akrual menjadi tantangan bagi semua pihak dengan adanya beberapa kendala yang dialami dalam menyusun laporan keuangan yang berbasis akrual. Kendala – kendala tersebut di tandai dengan pengelolaan penatausahaan yang terbatas dengan kurangnya pemahaman dalam penyusunan laporan keuangan atas akuntansi berbasis akrual. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Neni dan Anwar (2016) yang mengungkapkan terkait dengan implementasi basis akrual harus dilakukan dengan persiapan atas sistem akuntansi pemerintah yang berbasis akrual, pelatihan sumber daya manusia, dan penyediaan sarana dan prasarana dalam menunjang penyusunan dan penyajian laporan keuangan berbasis akrual.

Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Makassar dalam memperoleh pengetahuan mengenai penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada penyajian laporan keuangannya. Selanjutnya, peneliti juga ingin mengidentifikasi faktor – faktor yang mendukung penerapan standar akuntansi pemerintah yang berbasis akrual.

Sehingga, judul yang diangkat dalam penelitian ini yaitu “**Analisis Standar Akuntansi Pemerintah PP No. 71 Tahun 2010 Berbasis AkruaI Terhadap Penyajian Laporan Keuangan Pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar**”.

1.2 Fokus Penelitian

Fokus dari penelitian ini yaitu diterapkannya Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintah yang berbasis akrual pada instansi pemerintah Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar. Penelitian dilakukan secara mendalam dengan data yang mendukung pada penelitian ini yaitu data mengenai laporan keuangan.

1.3 Rumusan Masalah

Laporan keuangan adalah suatu informasi keuangan dalam periode tertentu yang bersifat netralitas yaitu diarahkan kepada kepentingan umum pengguna maupun pihak – pihak yang berperan penting dalam suatu pemerintah ataupun organisasi. Adanya perubahan dalam peraturan

Penelitian ini terkait dengan penyajian laporan keuangan sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) basis akrual yang diwajibkan bagi pemerintah daerah serta organisasi – organisasi lainnya yang diterapkan dilaporan keuangan berbasis akrual pada tahun 2015.

Adapun rumusan masalah:

- 1) Bagaimanakah penyajian laporan keuangan pada Kantor Imigrasi Kelas I Makassar telah sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual?
- 2) Faktor apa saja yang mendukung dalam penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual?

1.4 Tujuan Penelitian

Dilihat dari latar belakang serta rumusan masalah yang dikemukakan, sehingga tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu:

- 1) Menganalisis bentuk penyajian laporan keuangan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar apakah sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual.
- 2) Mengetahui faktor – faktor yang mendukung penyajian laporan keuangan kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar dengan PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual.

1.5 Kegunaan Penelitian

1. Manfaat praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini yaitu dapat memberikan bahan acuan atas penerapan PP No. 71 Tahun 2010 pada penyajian laporan keuangan secara maksimal didukung oleh faktor – faktor yang berperan sebagai indikasi dalam keberhasilan dari penyusunan dan pembuatan laporan keuangan yang berbasis akrual. Untuk itu dalam penelitian ini peneliti berkeinginan untuk terciptanya laporan keuangan yang memiliki meningkat.

2. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah dapat menghasilkan manfaat dalam pengembangan standar akuntansi pemerintah dalam berbasis akrual. Penelitian ini juga hendaklah dapat memberikan pengetahuan sebagai rujukan untuk peneliti – peneliti selanjutnya dalam membahas penerapan PP No. 71 Tahun 2010 terhadap penyajian laporan keuangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Kepatuhan diartikan sebagai keinginan atas upah dan usaha dalam menjauhkan diri dari suatu hukuman yang ditetapkan. Menurut (Lunenburg, 2012) teori kepatuhan ialah pendekatan terhadap struktur organisasi yang mengintegrasikan ide – ide dalam partisipasi manajemen. Tuntutan atas ketepatan waktu dalam penyajian laporan keuangan dalam menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang anggaran dan kegiatan Pemerintah Pusat, baik secara nasional maupun instansi yang berguna sebagai dasar penilaian kinerja, untuk menentukan ketaatan terhadap otorisasi anggaran dan tujuan akuntabilitas.

Menurut (Susilowati, 2004:68) bahwa terdapat dua indikator dasar yang terdapat pada literatur sosiologi mengenai ketaatan dalam hukum, disebutkan oleh faktor instrumental dan normatif. Pada pemahaman mengenai instrumental, memberikan pendapat bahwa seseorang disebabkan atas kepentingan seseorang dan menanggapi perubahan – perubahan dalam insentif, *tangible*, dan *penalty* yang saling bersangkutan atas sikap dan perilaku. Sedangkan perspektif normatif berpengaruh terhadap moral dan bertentangan dengan kepentingan pribadi, dimana individu mengikuti hukum yang diibaratkan selaras dengan norma – norma internal.

2.2 Teori Entitas (*Entity Theory*)

Teori entitas menurut (Santoso & Pambelum, 2008) menyatakan bahwa suatu organisasi dapat dikatakan sebagai satuan badan usaha ekonomi yang dilandasi atas dasar kedudukan yang terlepas dari pemilik atau pihak berbeda yang memiliki

peranan. Dalam perspektif ini, akuntansi memiliki peran penting dalam pelaporan keuangan serta sebagai kesatuan usaha, bukan termasuk pemilik yang memiliki peranan dalam laporan keuangan.

Berdasarkan (KSAP, 2009) dalam PSAP No. 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum pengertian entitas pelaporan serta entitas akuntansi adalah:

“Entitas pelaporan merupakan bagaian yang terdapat pada pemerintah yang didalamnya bersi satu atau lebih entitas pelaporan berdasarkan dari ketentuan peraturan perundang – undangan yang berkewajiban untuk menyambakan laporan pertanggungjawaban seperti laporan keuangan.”

“Entitas Akuntansi merupakan suatu unit yang terdapat pada pemerintah yang berperan sebagai pengguna anggaran/pengguna barang serta diwajibkan untuk menyelenggarakan dan menyusun suatu laporan keuangan untuk disatukan pada entitas pelaporan.”

Dalam hal ini, pemerintah pusat sebagai entitas memiliki peran untuk berkewajiban dalam menyampaikan laporan keuangan yang diharapkan bisa memberikan informasi keuangan untuk pihak berkepentingan yang ingin mengetahui secara dalam mengenai perbedaan nilai dalam laporan keuangan yang didalamnya memiliki karakteristik entitas.

2.3 Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Standar akuntansi yang diterapkan pada pemerintah sebelum adanya perubahan dalam mengatur keuangan negara, didalamnya telah dilakukan penerapan sistem pencatatan *single entry* yaitu pencatatan tunggal dimana menggunakan

metode pencatatan transaksi keuangan hanya dilakukan satu kali. Dimana pemerintah tidak mempunyai catatan terkait piutang serta utang, dan catatan atas aset tetap serta ekuitas. tersebut disebabkan oleh basis akuntansi dipergunakan pada saat itu merupakan basis kas berfokus pada arus kas masuk serta arus kas keluar.

2.3.1 Pengertian Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Dalam (PSAP, 2010) PP No. 71 tahun 2010, mengenai standar akuntansi pemerintah merupakan suatu prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. Yang dimaksudkan dalam prinsip tersebut adalah basis akuntansi, nilai historis, realisasi, substansi yang lebih untuk bentuk formal, perioditas, konsisten pengungkapan lengkap, dan penyajian wajar. Sedangkan menurut (Mahmudi, 2011:271), standar akuntansi pemerintah merupakan prinsip – prinsip akuntansi yang ditetapkan untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan baik pusat maupun daerah. Sehingga bisa mengambil penyimpulan yaitu sistem akuntansi pemerintah adalah suatu tindakan akuntansi yang semestinya dilaksanakan untuk sebagai contoh pembuatan penyusunan serta penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah hingga pusat yang memiliki kekuatan hukum.

Standar tersebut dapat diterapkan pada lingkup pemerintah yang memiliki mekanisme prosedur diantaranya tahap – tahap aktivitas yang dilaksanakan pada setiap kali dilakukan penyusunan terhadap pemberitahuan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah. Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KASP) terjadi atas komite konsultatif standar akuntansi pemerintah yang memiliki peranan dalam memberikan konsultasi atau pendapat dengan tujuan untuk mencapai perumusan konsep terhadap rancangan peraturan

pemerintah mengenai standar akuntansi pemerintah. KSAP sendiri memiliki konsep peraturan pemerintah yang membahas mengenai standar akuntansi pemerintah terhadap Menteri Keuangan dalam proses penetapan untuk peraturan pemerintah (Jannaini, 2012).

Dengan diberlakukan standar tersebut dapat dikatakan bahwa hasil proses akuntansi nantinya akan dapat digunakan sebagai alat komunikasi baik dari pemerintah dan *stakeholders* yang akan dijadikan gelolaan keuangan negara yang menjunjung tinggi akuntabel dan transparan.

2.3.2 Pentingnya Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Perkembangan akuntansi dalam lingkungan komersil atas diterbitkannya standar akuntansi keuangan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) memberikan manfaat yang diperlukan standar akuntansi pemerintah yang semakin kuat. Dalam organisasi komersil, pengambil keputusan dibutuhkan data untuk sebagai pengelola organisasinya. Sebagai dasar mengambil keputusan, informasi dibutuhkan dalam berkomunikasi serta bertanggung jawab dalam pengelolaan organisasi terhadap pihak lain.

Dengan penetapan Peraturan Pemerintah Standar Akuntansi Pemerintah, pemerintah pusat dan daerah mempunyai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Ini menandakan bahwa dalam pertanggungjawaban pelaksana APBN/APBD dalam rangka menyediakan laporan keuangan yang transparan dan akuntabilitas sehingga sejalan dengan pedoman yang berlaku.

2.3.3 Tujuan Standar Akuntansi Pemerintah

Standar akuntansi pemerintah adalah satu diantara kategori penting dalam peningkatan kualitas pelaporan keuangan pemerintah serta tata kelola keuangan negara. Pada PP No. 71 tahun 2010 tujuan dari standar akuntansi pemerintah adalah:

“Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah merupakan catatan dasar penyusunan dalam pengembangan Standar Akuntansi Pemerintah, serta sebagai rujukan untuk Komite Standar Akuntansi Pemerintah dalam penyusunan laporan keuangan, pemeriksaan, dan pemakai laporan keuangan untuk memecahkan masalah yang belum diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah.”

2.3.4 Manfaat Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Standar Akuntansi Pemerintah memberikan manfaat dalam menghasilkan dari penyampaian data keuangan secara keseluruhan terhadap pihak pengambil keputusan (Fakhrurazi, 2010). Dari adanya penerapan standar akuntansi pemerintah juga memiliki pengaruh yang dapat mencegah kesalahan pada laporan keuangan yang kedepannya akan meningkatkan konsistensi, keandalan, dan relevansi. Pemanfaatan yang dihasilkan dari adanya standar ini memberikan informasi keuangan transparan serta jujur sehingga dalam manajemen, standar akuntansi pemerintah akan mempermudah untuk perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas aset, kewajiban, serta ekuitas dana pemerintah.

Menurut (Lauma et al., 2012:86) manfaat lain dari standar akuntansi pemerintah adalah bagi akuntan keuangan pemerintah digunakan dalam pedoman penyusunan dan penyajian laporan keuangan dan bagi auditor sebagai kriteria audit dalam menilai penyajian laporan keuangan dapat sejalan dengan standar akuntansi

yang mengaturnya. Dalam penyusunan sistem informasi diharuskan sejalan dengan standar akuntansi, yaitu standar akuntansi pemerintah yang sudah ditetapkan.

2.4 Laporan Keuangan di Pemerintah

Laporan keuangan memiliki tujuan yaitu menyediakan informasi untuk memperkirakan besar sumber daya yang diperlukan dalam kegiatan operasional yang berkelanjutan, serta akibat dan ketidakpastian yang bersangkutan didalamnya. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi tentang indikasi sumber daya yang diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran dan ketentuan yang berlaku termasuk batas anggaran yang ditetapkan.

Lembaga entitas keuangan pemerintah pusat yang merupakan satuan kerja dalam kelompok yang menjalankan pemerintah untuk pelaksanaan urusan pemerintah sesuai asas otonom dan sebagai pelayanan umum masyarakat yang diharuskan dalam menyampaikan pertanggungjawaban atas laporan keuangannya. Sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Untuk mengetahui kinerja dari pemerintah pusat/daerah bisa dilihat pada laporan keuangannya. Laporan keuangan adalah suatu informasi keuangan dalam menyusun dengan cara sistematis mengenai posisi keuangan dan kinerja suatu entitas pada periode tertentu (Aliyah & Nahar, 2012). Tujuan dari pelaporan keuangan merupakan penyajian informasi yang berkaitan terhadap posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan serta memberikan informasi tentang

bagaimana suatu organisasi/instansi dalam penggunaan sumber daya dan menunjukkan pertanggungjawaban dalam menggunakan sumber daya tersebut.

2.5 Perbedaan PP No. 24 Tahun 2005 dan PP No. 71 Tahun 2010

Standar akuntansi pemerintah yang berlaku terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 (BPK, 2005) yaitu basis akuntansi memakai kas modifikasi menuju akrual. Dalam kerangka konseptualnya, basis kas yang berguna dalam pengakuan pendapatan, biaya dan belanja pada pelaporan realisasi anggaran dan basis akrual dalam pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam neraca. Pada laporan realisasi anggaran yang sifatnya berbasis kas mengakui suatu pendapatan yang diterima dalam rekening kas umum negara atau daerah pada entitas laporan dan belanja dapat mengakui bahwa kas tersebut dikeluarkan dari rekening kas umum negara atau daerah. Saat mengakui pendapatan pada basis akrual yaitu pemerintah memiliki kewenangan dalam melaksanakan penagihan hasil pada aktivitas. Pengakuan biaya atau beban dilaksanakan disaat pembayaran kewajiban telah terjadi.

Perbedaan yang jelas terdapat pada laporan keuangan yang pada awalnya memiliki empat jenis laporan keuangan yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan kemudian menjadi 7 (tujuh) bagian dalam laporan keuangan yang ditambah dengan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Tabel 2.1
Perbedaan PP No. 24 Tahun 2005 dan PP No. 71 Tahun 2010

PP No. 24 Tahun 2005	PP No. 71 Tahun 2010
Komponen Laporan Keuangan Pokok 1. Neraca 2. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 3. Laporan Arus Kas 4. Catatan Atas Laporan Keuangan Laporan Bersifat Operasional: 1. Laporan Kinerja Keuangan 2. Laporan Perubahan Ekuitas	Komponen Laporan Keuangan Pokok Laporan Anggaran: 1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Laporan Finansial: 1. Neraca 2. Laporan Operasional 3. Laporan Arus Kas 4. Laporan Perubahan Ekuitas Catatan Atas Laporan Keuangan

Sumber: Data diolah (2021)

Berikut penjelasan atas perubahan PP No. 24 Tahun 2005 dan PP No. 71 Tahun 2010:

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan ini dibutuhkan dalam pemenuhan kewajiban pemerintah telah disusun dalam perundang undangan. Pendapatan serta penerimaan atas pembiayaan mengakui disaat penerimaan dalam rekening kas umum negara maupun daerah. Pengeluaran serta belanja atas pembiayaan mengakui disaat terjadi pengeluaran dalam rekening kas umum negara atau daerah.

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

Pada basis kas tidak memiliki laporan tersendiri, namun pada basis akrual disajikan berdasarkan perbandingan dengan tahun sebelumnya dengan pos: Saldo Anggaran Lebih awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa lebih atau kurang dari biaya anggaran pada tahun berjalan, pemeriksaan

kesalahan dari pembukuan tahun sebelumnya, dan saldo anggaran lebih terakhir.

c. Neraca

Pada basis kas, ekuitas terbagi atas beberapa yaitu ekuitas lancar, ekuitas investasi, dan ekuitas cadangan. Sedangkan untuk basis akrual yang diperoleh ekuitas, yaitu kekayaan bersih atas kelebihan antara aset dan kewajiban pada tanggal laporan.

d. Laporan Arus Kas

Pada basis kas, laporan arus kas dibuat oleh suatu unit yang berfungsi dalam melakukan pembendaharaan terkait arus kas masuk serta keluar yang digolongkan ke dalam kegiatan operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan serta non anggaran. Sedangkan pada basis akrual, laporan arus kas dalam penyajian oleh unit yang memiliki peran pembendaharaan umum dan arus kas yang masuk dan keluar diklasifikasikan sebagai kegiatan operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

e. Laporan Operasional

Pada basis kas, menggunakan laporan kinerja keuangan yang bersifat pilihan dalam penyusunan entitas pelaporan keuangan untuk penyajian laporan berbasis akrual. Laporan kinerja keuangan menyajikan pos – pos: Pendapatan pada aktivitas operasional, beban menurut penyusunan bersistem fungsional dan menurut ekonomi, serta jumlah yang melebihi hasil dan kekurangan dalam anggaran biaya. Sedangkan pada basis akrual, menggunakan laporan operasional sebagai laporan keuangan dalam

penyajian pos – pos: Pendapatan LO dari kegiatan operasional, beban pada aktivitas operasional, dengan kelebihan dan kekurangan dari hasil anggaran biaya dari kegiatan non operasional.

f. Laporan Perubahan Ekuitas

Pada basis kas laporan perubahan ekuitas bersifat perbandingan dalam penyajian pos – pos: sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran, pendapatan dan belanja secara keseluruhan diakui secara langsung dalam ekuitas, akibat keseluruhan dengan perubahan kebijakan akuntansi dan pemeriksaan kesalahan yang bersifat dasar dalam ketentuan suatu standar yang terpisah. Sedangkan untuk basis akrual laporan perubahan ekuitas adalah laporan keuangan pokok yang menyajikan pos – pos: ekuitas awal, surplus/defisit LO pada periode bersangkutan, koreksi – koreksi yang langsung menambah dan mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir.

g. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)

Pada basis kas CaLK hampir sama dengan basis akrual namun ada perbedaan pada penyajiannya atas komponen – komponen laporan keuangan yang berbeda.

2.6 Faktor Pendukung Dalam Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Penyajian Laporan Keuangan

Dalam penyusunan dan menyajikan laporan keuangan daerah dibutuhkannya sumber daya manusia dan segala sesuatu yang mendukung secara teknis. Sumber daya manusia merupakan kesanggupan dari individu dalam kelembagaan dalam menjalankan tugas dengan peran masing-masing yang memiliki hak untuk mencapai

tujuan secara efektif dan efisien. Menurut (Rina & Kusuma, 2017:92), kompetensi sebagai salah satu penunjang dalam mendukung keefektifan dan keefisienan individu dalam melaksanakan tanggungjawabnya. Kompetensi sebagai sifat khas yang dimiliki oleh seseorang tersendiri yang memiliki keterampilan (*skill*), kemampuan (*ability*), dan pengetahuan (*knowledge*) yang baik.

Untuk perangkat teknis yang dibutuhkan pada penyajian laporan keuangan adalah *hardware* atau perangkat keras berupa unit computer dan *software* atau perangkat lunak berupa aplikasi khusus sebagai program sistem akuntansi pemerintah daerah (seperti Simda). Menurut (Sutono, 2014:1) perangkat keras merupakan bagian dari keseluruhan fisik yang terbentuk satu kesatuan Personal Computer (PC). Sedangkan perangkat lunak menurut (Sukamto, 2015:22), perangkat lunak adalah program komputer yang memegang kendali dan mengarahkan perangkat keras pada sebuah sistem informasi.

Selain itu dibutuhkannya juga faktor – faktor berdasarkan penerapan standar akuntansi pemerintah basis akrual pada penyajian laporan keuangan atas hasil penyelidikan kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yaitu:

1. Komitmen atas kebijakan dari pimpinan

Komitmen dari pimpinan merupakan syarat dasar yang dibutuhkan dalam menerapkan standar akuntansi pemerintah basis akrual terhadap laporan keuangan untuk mengurangi kepentingan pribadi. Komitmen dari kepala daerah mendukung dalam efektivitas penerapan basis akrual dengan kesepakatan anggaran kegiatan, perencanaan memadai, dan proses internalisasi perancaan. Aspek komitmen ini didukung oleh ketentuan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

berpendapat bahwa pimpinan instansi pemerintah memberi tanggung jawab dalam pengembangan kebijakan, prosedur, dan praktik detil dalam melakukan penyesuaian terhadap aktivitas instansi pemerintah, dan termasuk di dalamnya aktivitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.

2. Kualitas Laporan Keuangan dan Audit

Dalam melaporkan keuangan di sektor publik memiliki manfaat utama sebagai berikut akurabilitas mengelola sumberdaya oleh manajemen dalam wujud entitas sektor publik dalam pengambilan keputusan yang menyebabkan laporan keuangan tersebut harus disajikan dengan menghubungkan posisi keuangan serta keseluruhan transaksi yang terjadi selama kurun waktu tertentu. Atas informasi laporan keuangan tersebut bisa menyerahkan keyakinan atas kewajaran laporan keuangan apakah sudah diwujudkan menurut kriteria dan telah ditentukan, melalui pendapat opini dari audit. Suatu laporan keuangan dapat dikatakan berkualitas ketika laporan keuangan telah diaudit oleh auditor independen.

3. Resistensi Terhadap Perubahan

Dalam kemungkinan adanya perubahan terhadap sistem digunakan dalam suatu organisasi/instansi harus dibentuk berdasarkan kebijakan dan terlebih dahulu harus dilakukan upaya untuk mengubah kepada semua pihak yang terkait sehingga penerapan standar akuntansi pemerintah basis akrual dapat berjalan dengan baik tanpa adanya hambatan.

2.7 Tinjauan Empiris

Hasil penelitian yang dijalankan oleh berbagai peneliti terdahulu dijadikan sebagai pembentukan dalam menjalankan penelitian mengenai penerapan sistem akuntansi pemerintah pada laporan keuangan terhadap PP No. 71 tahun 2010.

Tabel 2.2
Daftar Penelitian Terdahulu

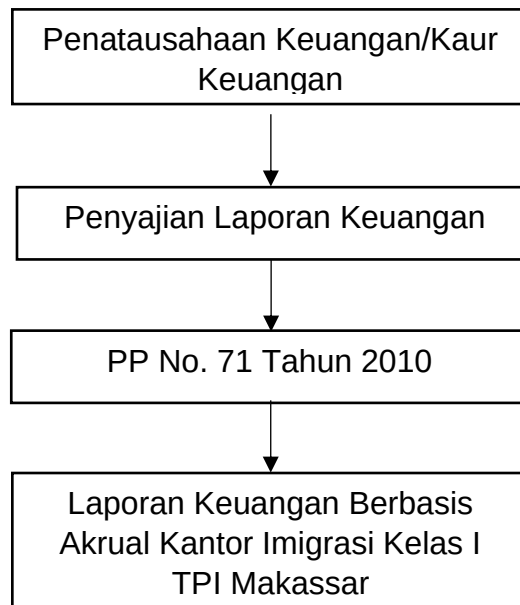
No.	penelitian	Judul	Hasil
1	(Rahmawati, Made, & Yogivaria, 2016)	Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua di Sekretariat DPRD Kabupaten Malang Berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.	Hasil dari penelitian ini yaitu dapat membandingkan total laporan keuangan yang disajikan serta terdapat penambahan pos dalam laporan keuangan berbasis akrual
2	(Yuningsih, 2018)	Evaluasi Penerapan PP No. 71 Tahun 2010 Tentang SAP Berbasis Akrua Dalam Penyajian Laporan Keuangan Politeknik Kesehatan Makassar.	Hasil penelitian ini yaitu penggunaan akuntansi berbasis akrual dapat dilihat dari teknik pengendalian intern yaitu tersusun dari bagian pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan observasi.
3	(Kusuma, Mus, & Lannai, 2020)	Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pada Inspektorat Kabupaten Enrekang.	Hasil dari penelitian ini yaitu dalam pelaksanaan menyusun laporan keuangan di Inspektorat Kab. Enrekang, masih diperlukan sumber daya manusia mempunyai kemampuan yang memenuhi syarat seperti pegawai yang berlatar belakang pendidikan akuntansi.

Sumber: Data Diolah (2021)

2.8 Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran yang mendasari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Sumber: Data Diolah, 2021

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Dengan melakukan penelitian, perlunya rancangan penelitian yang dapat mempermudah peneliti untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan –pertanyaan penelitiannya. Fokus dalam penelitian ini merupakan pada menerapkan PP No. 71 Tahun 2010 perihal Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual dengan faktor pendukung keberhasilan dengan menerapkan basis akrual pada laporan keuangan yang disajikan sehingga pendekatan yang dipakai pada penelitian ini merupakan pendekatan deskriptif kualitatif.

Metode pendekatan deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian dengan digunakan informasi kualitatif dijabarkan secara deskriptif yang menjelaskan atau mendeskripsikan tentang kondisi atau fenomena dari hasil wawancara dan mengamati tentang masalah yang diteliti di lapangan.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar yang berada di Jalan Perintis Kemerdekaan Km 13 Daya, Makasar, Sulawesi Selatan dan waktu penelitian akan dimulai pada bulan Mei hingga Agustus 2021.

3.3 Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini adalah suatu subjek yang didapat dan memiliki kejelasan pada saat mengambil data serta bagaimana data tersebut diolah. Data

primer yaitu dari hasil wawancara dan pengamatan dan data sekunder dari dokumen – dokumen yang berkaitan dengan laporan keuangan.

- a. Menurut (Febriansyah, 2017:23) data primer dapat diartikan sebagai sumber data yang dikelola secara langsung dari pemberian data oleh pihak pertama kepada pengumpul data yang sistemnya dengan melakukan wawancara. Data primer tersebut pertama kali dikelola oleh peneliti melalui pengambilan data pada kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar yang dilakukan secara langsung.
- b. Menurut (Dr.farida Nugrahani, 2014:113) data sekunder adalah sumber penambahan informasi yang diambil secara tidak langsung di lapangan selain sumber yang sudah dibuat oleh orang lain seperti dokumen, buku, statistik, dan foto. Dalam data sekunder pertanyaan atas wawancara tersebut di iringi dengan laporan keuangan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual. Sumber data sekunder adalah melengkapi serta mendukung dari data primer.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik penelitian yang digunakan apada penelitian ini adalah:

1. Teknik wawancara, yaitu teknik yang dilakukan dengan interaksi langsung dengan dilakukan tanya jawab dengan pihak yang bersangkutan pada penelitian ini yaitu pada penatausahaan keuangan.
2. Teknik dokumentasi, yaitu teknik yang dilakukan atas dokumen – dokumen atau data- data sekunder yang mendukung penelitian yang dimaksud adalah laporan keuangan yang disajikan pada kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Makassar.

3. Teknik analisis dan pengolahan data, yaitu teknik yang menggabungkan hasil penelitian wawancara dan pendokumentasian data yang kemudian didasarkan pada penelitian kepustakaan yaitu referensi, literatur, dan artikel atau jurnal dari peneliti terdahulu.

3.5 Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses pengolahan data menjadi informasi yang mudah di mengerti dan dapat memberikan solusi dari permasalahan penelitian. Aktivitas yang digunakan dalam analisis data sebagai berikut:

1. Peneliti akan mengumpulkan data yang berasal dari hasil wawancara dan dokumen – dokumen terkait laporan keuangan yang menjadi pokok a tau fokus dalam penelitian.
2. Melakukan analisis terhadap penyajian laporan keuangan kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar dengan SAP basis akrual PP No. 71 Tahun 2010.
3. Menyajikan hasil penelitian yang diperoleh secara naratif, matriks, dan grafis atas hasil perbandingan antara penyajian laporan keuangan kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar dengan SAP basis akrual PP No. 71 Tahun 2010.
4. Menarik kesimpulan dan verifikasi atas informasi atau data yang didapatkan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Perusahaan

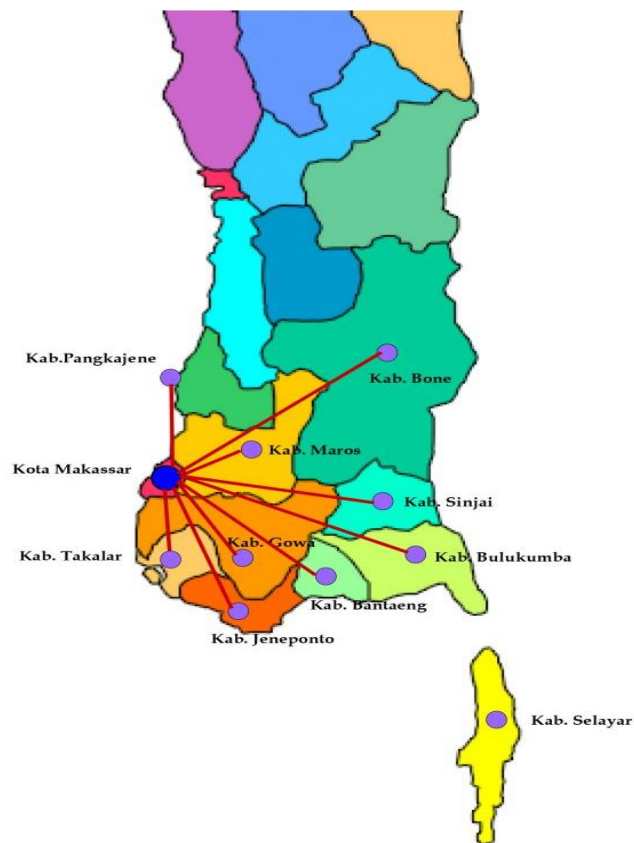
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar adalah salah satu entitas akuntansi dibawah Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang mulai didirikan sejak tahun 1948 dimana pembangunannya dibuat sejak Pemerintah Belanda. Sejak itu terbentuknya Institusi Imigrasi di tahun 1950, pada saat dibuatlah Kantor Daerah Imigrasi (Kandim) di Jl. Seram No. 2 dan sejak tahun 1978 mengubah namanya menjadi Jl. Tentara Pelajar. Akibat pertumbuhan zaman yang terjadi di Kota Makassar menyebabkan kantor tersebut diubah menjadi Kantor Direktorat Jendral Imigrasi (Kanditjen). Setelah itu di masa Reorganisasi, pada tahun 1980 diubah menjadi Kantor Imigrasi (Kanim). Pada tahun 2005, kantor Imigrasi Makassar secara resmi pindah ke Jl. Perintis Kemerdekaan Km 13 Daya, dan kemudian tanggal 23 Agustus 2005 di tahun yang sama kantor tersebut diresmikan langsung oleh Menteri Hukum dan Ham RI Bapak Hamid Awaluddin.

Kegiatan utama yang dilakukan oleh Kanim difokus dalam pelayanan serta pengawasan di mana di dalamnya terdiri dari kegiatan pemberian Paspor RI, dan perpanjangan izin tinggal bagi warga asing, serta pengawasan WNA (Warga Negara Asing). Hal tersebut disebabkan oleh tingginya tingkat intensitas aktivitas dari pelayanan pada Kantor Imigrasi Makassar serta banyaknya WNA keluar masuk kedalam wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Makassar. Hal tersebut ditandai dengan penegakan hukum yang berhubungan dengan keimigrasian yang berjalan baik dilihat dari jumlah orang asing yang ditahan dan dideportasi dari tahun ke tahun cukup

signifikan yang tidak terlepas dari kesiapan Aparat Kantor Imigrasi Kelas I Makassar untuk menjalankan tugasnya. Kualitas kinerja pegawai yang terus diupayakan untuk ditingkatkan dan mendukung tugas keimigrasian sehingga prosedur dalam menegakkan kedisiplinan dapat ditingkatkan juga.

Wilayah kerja yang terdapat dalam Kantor Imigrasi Kelas I Makassar ditentukan sebagai unit pelaksanaan teknis yang didalamnya memuat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.03. PR.07.04 Tahun 1991 didalamnya meliputi 11 (sebelas) wilayah kerja.

Gambar 4.1
Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Makassar



Sumber Data: <https://makassar.imigrasi.go.id/profile/wilayah-kerja/>

Kantor Imigrasi Kelas I Makassar sebagai unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi Direktorat Jenderal Imigrasi berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan mengikuti pada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah serta kaidah – kaidah pengelolaan keuangan yang baik dalam pemerintah. Secara basis akrual laporan keuangan dibuat sehingga sanggup menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, serta akuntabel. Pada laporan keuangan berupa laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

4.2 Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Kantor Imigrasi Kelas I TPI mendapatkan dana anggaran yang berasal dari APBN melalui daftar isian anggaran. Sumber dana yang berasal rupiah murni dan pendapatan negara bukan pajak yang sebagian digunakan kembali oleh Direktorat Jenderal Imigrasi yang di bagi ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar selaku unit pelaksana teknisnya. Dari anggaran yang diperoleh maka Kantor Imigrasi Kelas I Makassar diberikan kewenangan dan kewajiban atas pertanggungjawaban dalam proses menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas yang diberikan Direktorat Jenderal Imigrasi. Dalam melaksanakan kewajiban tersebut tentu adanya peraturan – peraturan yang ditetapkan dan harus diikuti sebagai ketataan terhadap norma – norma dan hukum yang berlaku. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar yang melakukan pelaporan keuangan setiap 6 (enam) bulan sekali atau per semester untuk dilaporkan sehingga harus adanya ketepatanwaktuan dalam menyelesaikan penyajian laporan keuangannya.

Atas penyajian laporan keuangan, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar sebagai entitas yang memiliki peran yang berkewajiban dalam menyampaikan laporan keuangan diharapkan dapat memberikan informasi keuangan kepada pihak yang berkepentingan yaitu Kementrian/Lembaga yang bersangkutan. Hal ini bertujuan agar adanya transparansi dari anggaran APBN yang diberikan untuk dijadikan sebagai suatu entitas laporan bagi Kementrian/Lembaga dalam melihat dan mengetahui secara dalam perbedaan nilai dalam laporan keuangan yang di dalamnya ada beberapa entitas yang berbeda sesuai fungsinya.

4.2.1 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah PP No. 71 Tahun 2010 Berbasis Akrua

Berdasarkan kegiatan penelitian yang dilakukan dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan pada kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar, peneliti mendapatkan sejumlah temuan yang berkaitan langsung dengan rumusan masalah yang dibuat oleh peneliti yaitu mengenai penerapan standar akuntansi pemerintah PP No. 71 tahun 2010 pada penyajian laporan keuangan serta faktor – faktor yang mendukung dalam penerapan standar akuntansi pemerintah basis akrual tersebut. Penyusunan dan penyajian laporan keuangan kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar peneliti mendapatkan bahwa tidak semua unsur yang terdapat didalam laporan keuangan dimana diatur berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 ditemukan. Beberapa komponen laporan keuangan dimaksud tidak ditemukan merupakan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) didalamnya terdapat bagian dari laporan anggaran dan laporan arus kas sebagai bagian yang ada laporan finansial. Untuk laporan arus kas hanya disajikan oleh

yang mempunyai fungsi pembendaharaan umum, dan laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih hanya disajikan oleh Bendahara Umum Negara dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasinya.

4.2.1.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) didalamnya menampilkan ikhtisar sumber, alokasi, serta penggunaan sumber daya keuangan dimana dikelola langsung oleh pemerintah pusat/daerah yang bertujuan untuk sehingga mencerminkan perbandingan baik dari segi anggaran hingga realisasinya yang dituang dalam satu periode pelaporan.

Anggaran yang diterima sebagai pendapatan serta aset pada kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar diperoleh oleh dana APBN sebagaimana dijelaskan oleh kaur keuangan kantor Imigrasi Kelas I Makassar:

“Sumber dana anggaran diterima dari APBN yang diturunkan melalui daftar isian anggaran, dana tersebut terbagi dua, yaitu rupiah murni dan pendapatan negara bukan pajak yang sebagian digunakan kembali dari Direktorat Jendral Imigrasi yang selanjutnya di bagi ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar untuk melaksanakan tugasnya sebagai pelayanan publik keimigrasian”

Tabel 4.1
Penyajian Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2020 Dan 2019
(Dalam Rupiah)

URAIAN	2020	2019	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	Rp 50.420.271.289	Rp 49.505.695.797	Rp 914.575.492	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(Rp 8.194.133.896)	(Rp 926.030.011)	Rp 1.051.896.115	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	Rp -	Rp -	Rp -	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	Rp -	Rp -	Rp -	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	Rp -	Rp -	Rp -	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	Rp -	Rp -	Rp -	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	Rp -	Rp -	Rp -	-
SELISIH REVALUASI ASET	Rp -	Rp -	Rp -	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	Rp -	Rp -	Rp -	-
LAIN - LAIN	Rp -	Rp -	Rp -	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	Rp 7.160.411.256	Rp 9.800.040.156	(Rp 2.639.628.900)	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(Rp 1.033.722.640)	Rp 554.010.145	(Rp 1.587.732.785)	-
EKUITAS AKHIR	Rp 49.386.548.649	Rp 50.059.705.942	(Rp 673.157.293)	-

Sumber: Laporan Keuangan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar T.A 2020

Pada penyajian Laporan Realisasi Anggaran tersebut, terdapat ada 3 (tiga) macam sumber dari anggaran yaitu pendapatan negara, hibah, belanja, hingga pembiayaan.

- 1) Pendapatan di lingkup Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar berasal dari Pendapatan dari pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN), jasa dan lain – lain. Pendapatan dari Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) berasal dari pendapatan sewa dan pemindahtanganan BMN. Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau dari perolehan lainnya yang sah. Pada kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar, pendapatan diakui saat penerimaan atas pendapatan dari pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) masuk ke rekening Kas Umum Negara (KUN). Pada pencatatan pendapatan dilaksanakan dengan azas bruto, dimana pembukuan atas penerimaan bruto dengan tidak dilakukannya pencatatan jumlah netonya.
- 2) Belanja pada lingkup kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar pengakuannya pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Kas Umum Negara (KUN). Melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi dalam pertanggungjawaban atas pengeluaran yang disahkan oleh Kantor Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja di klasifikasikan berdasarkan jenis belanja yang terjadi atas pelaksanaan suatu aktivitas. Pada kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar APBN dikhususkan dalam penggunaan dengan jenis belanja berupa yaitu belanja pegawai, barang serta modal.

Atas penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar dalam menyajikan laporan realisasi anggaran telah menerapkan PP No. 71 tahun 2010, hal ini sejalan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) 02 paragraf 8 dan paragraf 9 tentang Struktur Laporan Realisasi Anggaran, paragraf 10 tentang Periode Laporan, paragraf 13 dan paragraf 14 tentang isi laporan realisasi anggaran, paragraf 16 dan 17 tentang informasi yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran atau dalam catatan atas laporan keuangan, paragraf 21-29 tentang akuntansi pendapatan, paragraf 31-34, paragraf 44 dan 45 tentang akuntansi pembelanjaan, paragraph 47 tentang akuntansi surplus/defisit-LRA, paragraph 52-53, 56 tentang akuntansi penerimaan pembiayaan, paragraph 59 tentang akuntansi pembiayaan neto, paragraph 61 tentang akuntansi sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SILPA/SIKPA), paragraph 63-66 tentang transaksi dalam mata uang asing, dan paragraph 67-68 tentang tanggal efektif .

4.2.1.2 Neraca

Neraca memberikan gambaran atas posisi keuangan suatu entitas dalam laporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Aset yang tersaji didalam neraca yaitu sejumlah aset yang terbagi menjadi aset lancar dan aset tetap, kewajiban, serta ekuitas.

Tabel 4.2
Penyajian Neraca Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2020 Dan 2019

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2020	2019	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp. 210.000.000	Rp. -	Rp. 210.000.000	0.00
Persediaan	Rp. 1.064.967.783	Rp. 1.736.970.221	(Rp. 672.002.438)	(38.69)
JUMLAH ASET LANCAR	Rp. 1.274.967.783	Rp. 1.736.970.221	(Rp. 462.002.438)	(26.60)
ASET TETAP				
Tanah	Rp. 36.418.556.000	Rp. 36.418.556.000	Rp. -	0.00
Peralatan dan Mesin	Rp. 18.957.833.581	Rp. 18.436.613.081	Rp 521.220.500	2.83
Gedung dan Bangunan	Rp. 10.885.893.000	Rp. 10.885.893.000	Rp. -	0.00
Aset Tetap Lainnya	Rp 40.810.243	Rp 40.810.243	Rp. -	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	-Rp 17.994.614.534	-Rp 17.086.466.930	(Rp. 906.147.604)	5.32
JUMLAH ASET TETAP	Rp 48.308.478.290	Rp 48.695.405.394	(Rp. 386.927.104)	(0.79)
LAINNYA				
Aset Tak berwujud	Rp. 15.516.240	Rp. 15.516.240	Rp. -	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN AMORTISASIN ASET	(Rp. 241.665)	(Rp. 1594736)	(Rp. 818.928)	51.35
JUMLAH ASET LAINNYA	Rp. 13.102.576	Rp 13.921.504	(Rp. 818.928)	(5.88)
JUMLAH ASET	Rp. 49.596.548.649	Rp. 50.445.297.119	Rp. 894.748.470	(1.68)
KEWAJIBAN				
BEBAN JANGKA PENDEK				
Pendapatan Diterima dimuka	Rp. -	Rp. 26.025.830	(Rp. 26.025.830)	100.00
Uang Muka dari KPPN	Rp. 210.000.000	Rp. -	Rp. 210.000.000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	Rp. 210.000.000	Rp. 26.025.830	Rp. 183.947.170	706.89

JUMLAH KEWAJIBAN	Rp. 210.000.000	Rp. 26.025.830	Rp. 183.947.170	706.89
EKUITAS				
Ekuitas	Rp. 49.386.548.649	Rp. 50.420.271.289	(Rp. 1.033.722.640)	(2.05)
Jumlah Ekuitas	Rp. 49.386.548.649	Rp. 50.420.271.289	(Rp. 1.033.722.640)	(2.05)
Jumlah Ekuitas	Rp. 49.386.548.649	Rp. 50.420.271.289	(Rp. 1.033.722.640)	(2.05)
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	Rp. 49.596.548.649	Rp. 50.446.297.119	(Rp. 849748470)	(1.68)

Sumber: Laporan Keuangan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar T.A 2020

1) Aset

a) Aset Lancar

Pada kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar aset lancar yang disajikan pada neraca terdiri dari kas yang menggunakan nilai nominal, yaitu kas yang dalam bentuk valuta asing disajikan dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia (BI) pada tanggal neraca. Kemudian ada persediaan yang dicatat dengan ketentuan sebesar harga pembelian terakhir jika didapatkan dari pembelian, harga standar jika didapatkan atas produksi sendiri, dan harga wajar/estimasi nilai penjualannya jika didapatkan dengan cara lainnya.

b) Aset tetap atau aset tidak lancar

Pada aset tetap menyangkut seluruh aset berwujud yang digunakan oleh pemerintah maupun kepentingan publik yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun. Pada aset tetap dicatat sebesar dengan biaya perolehan. Penyusutan dari aset tetap dilaksanakan setiap akhir semester tidak memperhitungkan nilai residunya.

“Untuk penyusutan aset tetap pada kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar dilaksanakan diakhir semester dengan mengalokasikan

nilai yang disusutkan dari aset tetapnya secara merata setiap semester dihitung dari masa manfaatnya. Untuk masa manfaatnya, kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar ditentukan dengan pedoman dari Keputusan Menteri Keuangan.”

c) Aset lainnya

Untuk aset lainnya atau aset tak berwujud seperti tagihan penjualan angsuran jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga, dan kas yang pemakaiannya dibatasi diperlihatkan sebanyak nilai tercatat neto yakni sebanyak nilai perolehan sesudah dikurang akumulasi.

“Untuk amortisasi dari aset tak berwujudnya dia memiliki masa manfaat yang terbatas dan dihitung menggunakan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan untuk aset tak berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas tidak lakukan kegiatan amortisasi.”

2) Kewajiban

Dalam laporan neraca terdapat kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek diklasifikasikan untuk dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Begitupun sebaliknya untuk kewajiban jangka panjang diklasifikasikan untuk dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban akan di catat sebanyak nilai nominal, yakni sebanyak nilai kewajiban pemerintah pada saat awal transaksi berlangsung.

3) Ekuitas

Ekuitas adalah selisih antara aset serta kewajiban dalam sebuah periode. Dalam pengungkapan lebih lanjut mengenai ekuitas akan ditampilkan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar menyajikan neraca telah sesuai dengan penerapan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual dan mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) 01. Pada pengklasifikasian dan penyajian aset baik aset lancar, aset tidak lancar, aset lainnya, kewajiban baik kewajiban jangka pendek dan panjang serta ekuitas terdapat pada paragraf 45-46, paragraf 49 tentang klasifikasi pos neraca, paragraf 54 tentang aset lancar, paragraf 56-72 tentang aset non lancar, paragraph 67-72, paragraph 74 tentang pengakuan dan pengukuran aset, paragraf 75 tentang kewajiban jangka pendek, paragraf 78 tentang kewajiban jangka panjang, paragraf 81-83 tentang pengakuan dan pengukuran kewajiban, serta paragraph 84 tentang ekuitas..

4.2.1.3 Laporan Operasional

Laporan operasional menyajikan bermacam unsur pendapat-LO, beban, surplus/defisit dari operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO pada kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar berupa pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN, serta pendapatan yang bersumber dari sewa tanah,

gedung dan bangunan. Pada laporan operasional juga hanya terdapat beban operasional karena anggaran digunakan untuk belanja.

Tabel 4.3
Penyajian Laporan Operasional Untuk Periode
Yang Berakhir 30 Juni 2020 Dan 2019

URAIAN	2020	2019	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	Rp. -	Rp. -	Rp. -	
PENDAPATAN OPERASIONAL	Rp. -	Rp. -	Rp. -	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	Rp. -	Rp. -	Rp. -	
Pendapatan Pajak Penghasilan	Rp. -	Rp. -	Rp. -	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	Rp. -	Rp. -	Rp. -	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	Rp. -	Rp. -	Rp. -	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	Rp. -	Rp. -	Rp. -	
Pendapatan Cukai	Rp. -	Rp. -	Rp. -	
Pendapatan Pajak Lainnya	Rp. -	Rp. -	Rp. -	
Pendapatan Bea Masuk	Rp. -	Rp. -	Rp. -	
Pendapatan Bea Keluar	Rp. -	Rp. -	Rp. -	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	Rp. -	Rp. -	Rp. -	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	Rp. -	Rp. -	Rp. -	
Pendapatan Sumber Daya Alam	Rp. -	Rp. -	Rp. -	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	Rp. -	Rp. -	Rp. -	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	Rp. 36.944.222	Rp. 10.749.405	Rp. 26.194.817	243.686
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	Rp. 36.944.222	Rp. 10.749.405	Rp. 26.194.817	243.686
PENDAPATAN HIBAH	Rp. -	Rp. -	Rp. -	
Pendapatan Hibah	Rp. -	Rp. -	Rp. -	
Jumlah Pendapatan Hibah	Rp. -	Rp. -	Rp. -	
Jumlah Pendapatan	Rp. 36.944.222	Rp. 10.749.405	Rp. 26.194.817	234.686
BEBAN OPERASIONAL	Rp. -	Rp. -	Rp.	
Beban Pegawai	Rp. 3.338.096.817	Rp. 3.183.883.452	Rp. 154.213.365	4.844

Beban Persediaan	Rp. 2.171.955.965	Rp. 3.161.754.686	(Rp. 989.798.721)	31.305
Beban Barang dan Jasa	Rp. 1.476.812.398	Rp. 1.144.754.677	(Rp. 332.057.721)	29.007
Beban Pemeliharaan	Rp. 255.136.966	Rp. 391.796.866	(Rp. 136.659.900)	34.88
Beban Perjalanan Dinas	Rp. 127.629.400	Rp. 291.361.865	(Rp. 163.732.465)	56.196
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	Rp. -	Rp. -	Rp. -	
Beban bunga	Rp. -	Rp. -	Rp. -	
Beban Subsidi	Rp. -	Rp. -	Rp. -	
Beban Hibah	Rp. -	Rp. -	Rp. -	
Beban Bantuan Sosial	Rp. -			
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	Rp. 868.974.731	Rp. 1.094.415.686	(Rp. 225.440.955)	(20.599)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	Rp. -		Rp. -	
Beban Lain - Lain	Rp. -		Rp. -	
JJUMLAH BEBAN	Rp. 8.238.606.277	Rp. 9.267.967.232	(Rp. 1.029.360.955)	11.107
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	-Rp. 8.201.662.055	-Rp. 9.257.217.827	Rp. 1.055.555.772	11.403
KEGIATAN OPERASIONAL	Rp. -	Rp. -	Rp. -	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	Rp. -	Rp. -	Rp. -	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	Rp. -	Rp. -	Rp. -	
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	Rp. -	Rp. -	Rp. -	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp. -	Rp. -	Rp. -	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp. -	Rp. -	Rp. -	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp. -	Rp. -	Rp. -	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp. 7.528.159	Rp. 11.187.816	(Rp. 3.659.657)	(32.711)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp. 13.985.233	Rp. 14.626.304	(Rp. 641.071)	(43.83)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp. 6.457.074	Rp. 3.438.488	Rp. 3.018.586	87.788
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	Rp. 7.528.159	Rp. 11.187.816	(Rp. 3.659.657)	(37.711)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(Rp. 8.194.133.896)	(Rp. 9.246.030.011)	Rp. 1.051.896.115	(11.377)
POS LUAR BIASA	Rp. -	Rp. -	Rp. -	

Beban Luar Biasa	Rp. -	Rp. -	Rp. -	
POS LUAR BIASA	Rp. -	Rp. -	Rp. -	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(Rp. 8.194.133.896)	(Rp. 9.246.030.011)	Rp. 1.051.896.115	(11.377)

Sumber: Laporan Keuangan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar T.A 2020

Pendapatan-LO merupakan hak pemerintah pusat dalam menambah ekuitas selama periode anggaran yang bersangkutan. Beban ialah pengurangan manfaat ekonomi atau potensi jasa pada saat pelaporan yang mengakibatkan penurunan ekuitas. Berbentuk pengeluaran, penggunaan aset serta munculnya kewajiban.

“Untuk pendapatan-LO, dia diakui saat waktu munculnya hak atas pendapatan yang direalisasi maksudnya adanya aliran dari sumber dana yang masuk dan untuk beban dia diakui saat munculnya kewajiban, penggunaan aset, adanya penurunan manfaat ekonomi atau dari potensi jasa yang diberikan”

Berdasarkan laporan operasional kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar telah menerapkan PP No. 71 Tahun 2010. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini menemukan bila pada laporan operasional ini mengacu pada PSAP 12 tentang laporan operasional. Dimana terdapat pada paragraf 92 mengenai pos-pos yang terdapat dalam laporan operasional, yaitu pendapatan-LO atas kegiatan operasional, beban atas kegiatan operasional. Surplus/deficit dari kegiatan non operasional (bila ada), pos luar biasa (bila ada), dan surplus/deficit-LO.

4.2.1.4 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan perubahan ekuitas didalamnya berisikan informasi yang memiliki kaitan langsung peningkatan maupun penurunan ekuitas dilihat pada

tahun pelaporan tersebut kemudian dibandingkan dengan laporan tahun sebelumnya. Didalam laporan ekuitas dijelaskan secara langsung mengenai ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi yang bertujuan untuk memperbanyak atau mengurangi ekuitas.

Tabel 4.4
Laporan Perubahan Ekuitas Untuk Periode Yang Berakhir
30 Juni 2020 Dan 2019

URAIAN	2020	2019	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	Rp. 50.420.271.289	Rp. 49.505.695.797	Rp. 914.575.492	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(Rp. 8.194.133.896)	(Rp. 926.030.011)	Rp. 1.051.896.115	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	0	0	0	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	-
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	-
LAIN – LAIN	0	0	0	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	Rp. 7.160.411.256	Rp. 9.800.040.156	(Rp. 2.639.628.900)	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(Rp. 1.033.722.640)	Rp. 554.010.145	(Rp. 1.587.732.785)	-
EKUITAS AKHIR	Rp. 49.386.548.649	Rp. 5.005.970.5942	(Rp. 673.157.293)	-

Sumber: Laporan Keuangan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar T.A 2020

Hasil penelitian ini menemukan bahwa pada kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar menyajikan posisi keuangan tahun sebelumnya yakni tahun 2019 sebagai banding dengan tahun 2019. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, menemukan bahwa penyajian laporan perubahan keuangan tersebut

telah mengacu pada PSAP 01 pada paragraf 101-102 mengenai pos – pos dalam laporan perubahan ekuitas. Dimana pada laporan perubahan ekuitas tersebut terdapat pos-pos sesuai beserta terdapat rincian yang lebih lanjut pada CaLK.

4.2.1.5 Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar disusun sebanyak 6 (enam) bab yang terdiri dari:

- 1) Penjelasan umum;
- 2) Penjelasan dari setiap pos Laporan Realisasi Anggaran;
- 3) Penjelasan dari setiap pos Neraca;
- 4) Penjelasan dari Laporan Operasional;
- 5) Penjelasan dari Laporan Perubahan Ekuitas;
- 6) Pengungkapan lainnya.

Dalam penyajian Catatan atas Laporan Keuangan kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar menjelaskan keseluruhan pos laporan keuangan secara rinci disertakan penjelasan pengungkapan informasi yang wajibkan dan diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementrian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar telah menyajikan catatan atas laporan keuangan yang telah dilihat didasarkan penerapan PP No. 71 Tahun 2010 yang didalamnya

membahas mengenai Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual. Hal ini mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) 04 pada paragraph 104-106 tentang struktur catatan atas laporan keuangan, paragraph 108 tentang penyajian kebijakan – kebijakan akuntansi, paragraph 113 tentang pengungkapan lainnya.

Gambar 4.2

Laporan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar (408230)	
Semester I Tahun 2020	
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	
A. PENJELASAN UMUM	
A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan	
Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2014-2019 yang selanjutnya disebut Renstra Kemenkumham adalah dokumen perencanaan yang memuat penjabaran dari visi, misi, tujuan, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, target kinerja, dan kerangka pendanaan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014-2019. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan. Untuk mewujudkan tujuan di atas Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar berkomitmen dengan visi <i>'mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan keuangan negara yang profesional, akuntabel, sinergi, transparan dan inovatif (PASTI) melalui akuntansi pemerintah menuju Laporan Keuangan Kementerian/Negara yang berkualitas.'</i> Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut: - Menyelenggarakan yang berkelanjutan berkaitan implementasi akuntansi pemerintah kepada Kementerian Negara/Lembaga. - Membina secara efektif Kementerian Negara/Lembaga dalam pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi yang diimplementasikan. - Mengembangkan sistem yang profesional dan terpercaya. - Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal kepada para pemangku kepentingan.	
A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	
Laporan Keuangan Semester I Tahun 2020 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar. Laporan ini dihasilkan melalui sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah system yang menghasilkan informasi Aset Tetap, Persediaan, Lainnya untuk penyusunan Neraca dan Laporan Barang Milik Negara serta Laporan Manajerial Lainnya dan Aset	

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar belum pernah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal.

Keterangan	Anggaran Tahun 2020	
	Anggaran Awal	Anggaran Revisi
Pendapatan	-	-
Pendapatan Jasa	-	-
Pendapatan Lain-lain	-	-
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja		
Belanja Pegawai	5.758.818.000	5.758.818.000
Belanja Barang	7.626.109.000	7.626.109.000
Belanja Modal	273.663.000	273.663.000
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Jumlah Belanja	13.658.590.000	13.658.590.000
JUMLAH	13.658.590.000	13.658.590.000

B.1 PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp. 19.243.992,-. Pendapatan di lingkup Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar berasal dari Pendapatan dari Pemanfaatan BMN, Jasa dan Lain-Lain. Pendapatan dari Pemanfaatan BMN berasal dari Pendapatan Sewa dan Pemindatanganan BMN.

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Pengelolaan BMN Semester I Tahun 2020

Uraian	Semester I Tahun Anggaran 2020		% Realisasi
	Anggaran	Realisasi	
Pendapatan PNBPN	-	19.243.992	-
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TYL		-	-
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan		-	-
Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin		-	-
Pendapatan Pemanfaatan BMN Lainnya	-	-	-
JUMLAH	-	19.243.992	-

Sumber: Laporan Keuangan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar T.A 2020

4.2.2 Faktor – Faktor Pendukung Penerapan PP. No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Dalam Penyajian Laporan Keuangan

Pada aktifitas penyajian laporan keuangan kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar, terdapat 2 (dua) faktor yang mendukung dalam penyajian laporan keuangannya yaitu sumber daya manusia dan perangkat teknis seperti perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*). Dalam sumber daya manusia *skill* dan pengetahuan yang mendalam sangat penting digunakan sebagai pelaksana aktivitas yang memiliki tanggung jawab terhadap satuan kerja dalam menyajikan laporan keuangan sehingga diharapkan tidak adanya kesalahan didalamnya. Namun tetap saja ada kendala – kendala yang dihadapi salah satunya adalah latar belakang pendidikan. Hal ini disampaikan oleh Kepala Urusan (Kaur) keuangan yang mengatakan:

“Untuk latar belakang pendidikan pada bagian keuangan bermacam – macam tidak hanya dari sarjana dibidang ekonomi namun ada juga dari hukum, teknik dan sebagainya.”

Sehingga dari pihak kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar terus melakukan upaya peningkatan terhadap sumber daya manusianya. Salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan – pelatihan sebagai penunjang dalam meningkatkan dan memperoleh kualitas dari penyajian laporan keuangan.

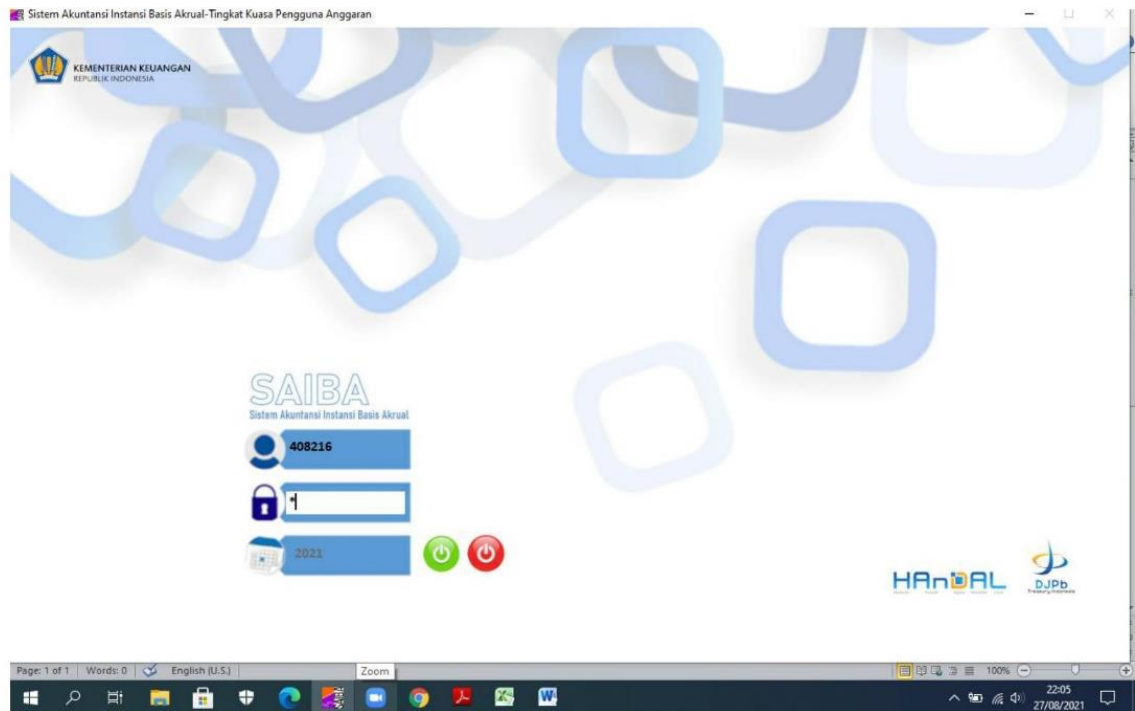
“Untuk pelatihan – pelatihan yang sebagai penunjang bagi pegawai tentu ada dan terus dilakukan. Pelatihan tersebut diselenggarakan oleh Kantor Wilayah

Kementrian Hukum dan HAM sebagai kantor pusat yang menaungi kantor Imigrasi ini” lanjutnya.

Upaya lainnya adalah dengan adanya komunikasi vertikal antara pimpinan dan karyawan yang dilakukan secara efisien sebagai bentuk kerjasama dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Sehingga dapat menyelesaikan tugas dari masing – masing satuan kerja dengan baik sebagaimana mestinya.

Pada faktor pendukung perangkat teknis dalam penyusunan laporan keuangan, kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar menggunakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) atau rangkaian sistem secara tradisional serta yang terkomputerisasi pada awal dikumpulkannya data, pencatatan, dan pengikhtisaran hingga pelaporan posisi keuangan serta operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. Sistem Akuntansi Instansi (SAI) terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAIBA ini dibuat dengan fungsi dalam memperoleh laporan keuangan satuan kerja yang tersusun dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Dan untuk SIMAK-BMN merupakan sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, lainnya dalam menyusun neraca, laporan barang milik negara, laporan manajerial lainnya serta aset.

Gambar 4.3
Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA)



Sumber: Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar

Menurut salah satu pegawai pada bagian keuangan yang memiliki kewajiban dalam menyusun dan menyajikan keuangan mengatakan bahwa pada proses nya, untuk pembuatan laporan keuangan kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar terdapat 3 (tiga) tahapan, lebih jelas nya seperti yang dikatakan dalam hasil wawancara:

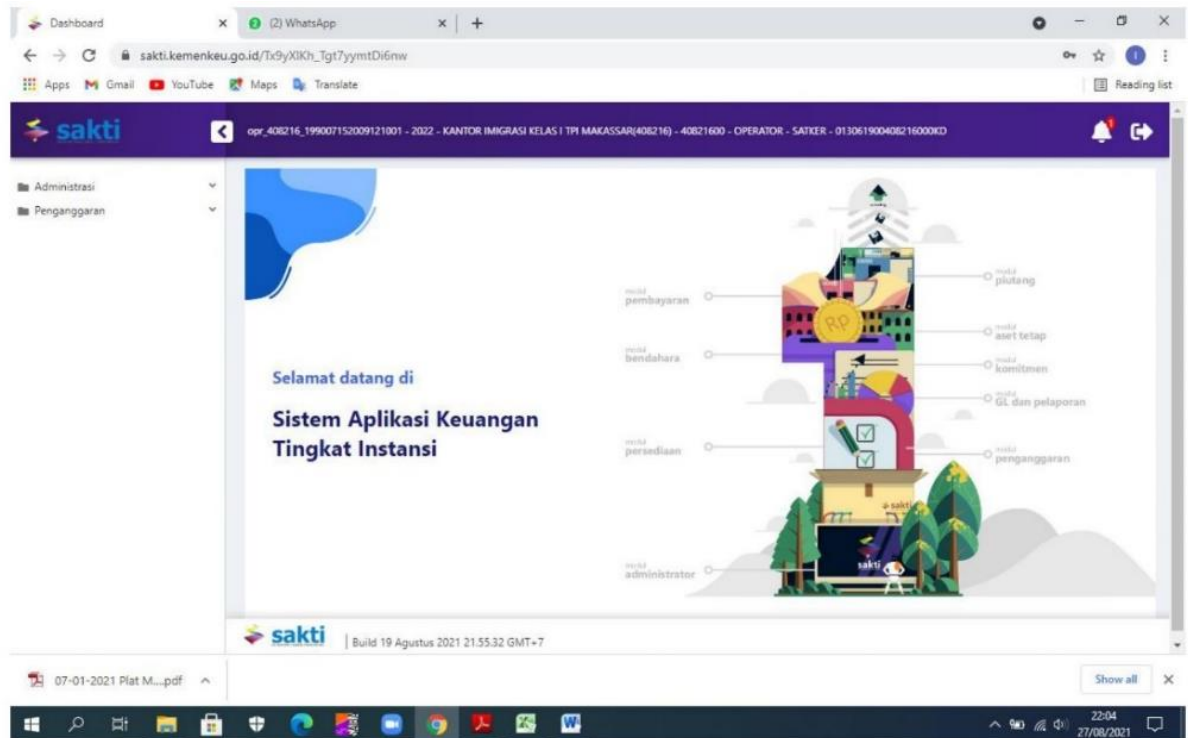
“Dalam penyusunan laporan keuangan ada aplikasi di bagian umum yang gunakan namanya aplikasi SIMAK-BMN kalau bagian keuangan menggunakan aplikasi E-Rekon yang dilakukan setiap bulan dan memiliki jangka waktu/periode tertentu jadi tidak bisa di gunakan seenaknya. Kedua aplikasi ini yang saling berhubungan untuk membuat laporan keuangan”.

Secara jelas, untuk mengetahui sistem informasi akuntansi yang digunakan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar dibagi menjadi 3 (tiga) sesuai tahapannya yaitu penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan. Hal ini disampaikan oleh pegawai yang berada pada Kaur bagian keuangan yang memiliki tugas dalam penyajian laporan keuangan.

“Untuk tahun 2021 aplikasi yang digunakan dibagi menjadi 3 (tiga) tahap; 1) penganggaran; 2) pelaksanaan; 3) pelaporan. Dalam penganggaran kita menggunakan 2 aplikasi 1 ap SAKTI (Sistem Akuntansi Tingkat Instansi) 2 KRISNA yang memuat target – target kinerja kantor imigrasrasi kelas I tpi Makassar”.

Untuk tahap penganggaran, sistem informasi akuntansi yang digunakan adalah Aplikasi SAKTI (Sistem Akuntansi Tingkat Instansi) dimana aplikasi ini digunakan sebagai sarana bagi satuan kerja untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. Aplikasi ini mengintegrasikan seluruh aplikasi satker yang ada. Dan untuk aplikasi KRISNA (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran) digunakan sebagai sistem yang mempermudah Kementerian/Lembaga untuk merevisi atau menyesuaikan dan memperbarui usulan RENJA (Rencana Kerja Kementrian/Lembaga) atau perencanaan secara terintegritas.

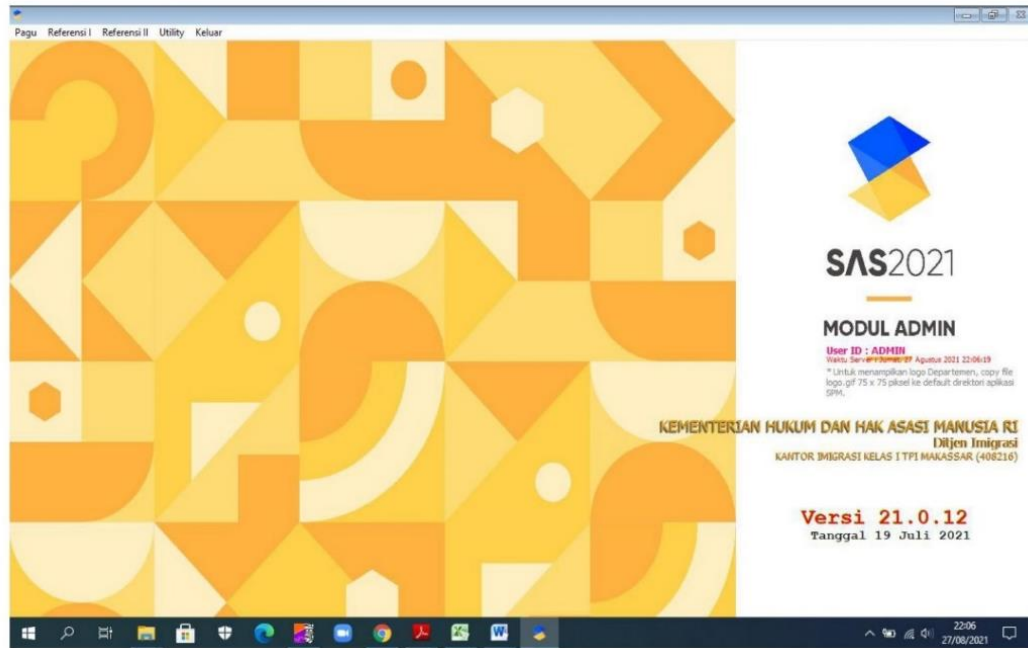
Gambar 4.4
SAKTI (Sistem Akuntansi Tingkat Instansi)



Sumber: Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar

Pada tahap pelaksanaan dilakukan setelah penganggaran selesai kemudian di pindahkan ke dalam aplikasi SAS atau Aplikasi Satuan Kerja Pembendaharaan untuk menjalankan tugas mulai dari Data Kontrak, SPM, LPJ Bendahara bagi satker dan sebagainya yang menyangkut aktifitas pembelian maupun pelaksanaan anggaran baik ke pegawai dan pihak ketiga.

Gambar 4.5
Aplikasi SAS (Satuan Kerja Pembendaharaan)



Sumber: Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar

“Setelah dianggarkan barang maupun persediaan yang dihasilkan akan dimasukkan ke aplikasi SIMAK BMN untuk yang hasilnya barang, dan persediaan ke aplikasi persediaan. Setelah selesai, semua data yang ada di SAS, SIMAK-BMN, persediaan dikirim ke aplikasi SAIBA. Dalam aplikasi SAIBA akan di cocokan uang yang keluar berapa, jenis barangnya apakah sebagai barang milik negara atau persediaan, dana atau sebagai jasa akan dicocokkan/ direkonsiliasi untuk tingkat kantor Imigrasi Kelas I TPI makassar. Jadi akan terlihat uang yang dikeluarkan berapa hasilnya apa.”

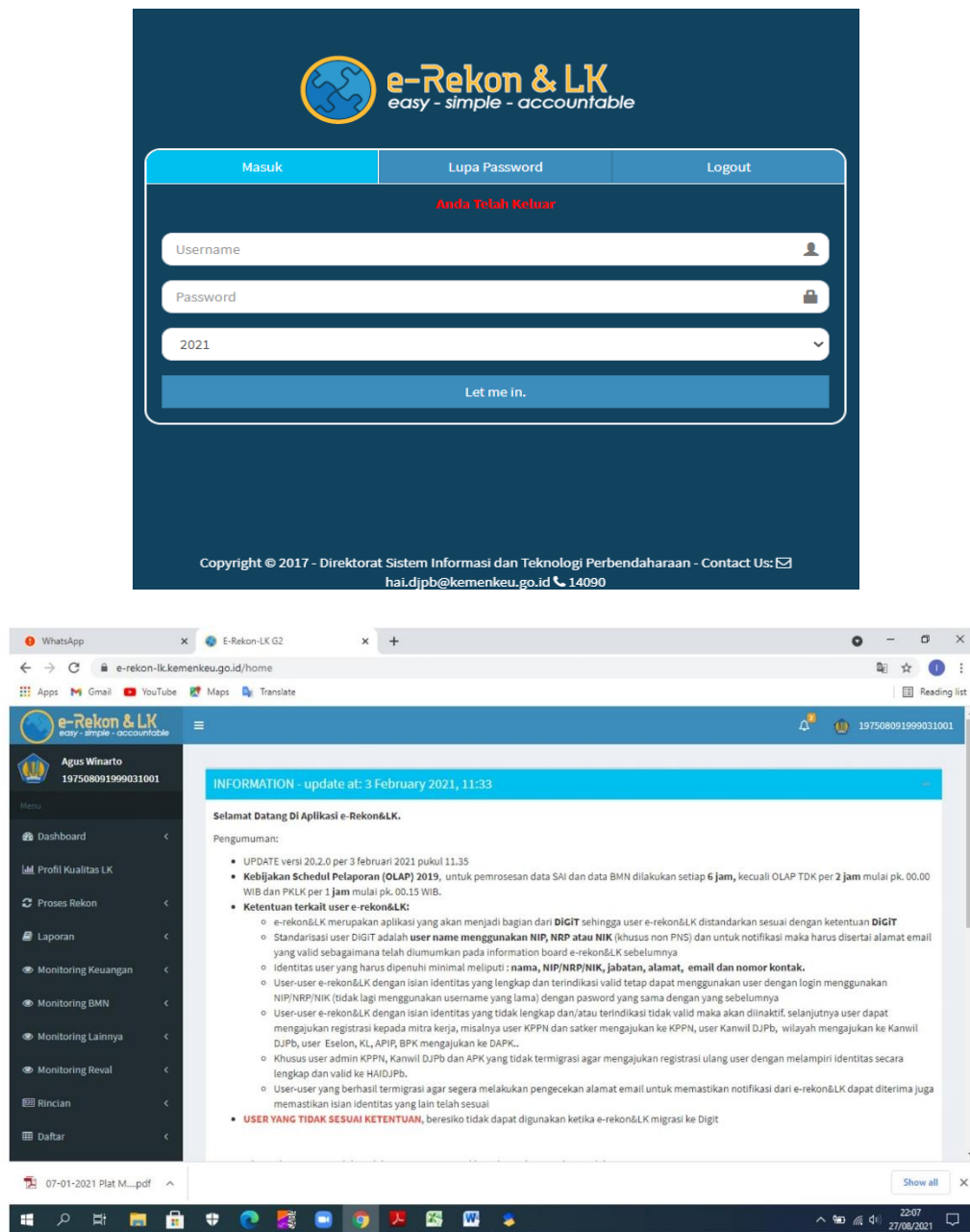
Rekonsiliasi pada tahap ini dilakukan 2 (dua) kali setahun artinya dilakukan persemester dari Januari – Juni dan Juli-Desember. Rekonsiliasi dapat diartikan sebagai aktifitas untuk melihat dan mencocokkan pengeluaran yang ada

pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar sesuai dengan pengeluaran dari Kementerian Keuangan. Apabila terdapat selisih maka akan diketahui adanya kesalahan pencatatan atau perbedaan pembukuan yang bisa saja terjadi di dalam pengangarannya.

“Setelah tidak ada selisih contohnya akan di clear bahwa uang yang dikeluarkan dan barang yang didapatkan sesuai sehingga data tersebut sudah bisa diajukan untuk dilakukan rekonsiliasi dengan Kementrian Keuangan melalui aplikasi e-Rekon. Jadi dari aplikasi SAIBA di upload ke e-Rekon yg dikelola Kemenkeu. Dari situlah Kemenkeu akan mencocokkan dengan aplikasi – aplikasi yang lain termasuk e-Performance, smart DJA, Satu DJA karena pelaksanaan pasti ada perubahan – perubahan baik itu akun dalam pelaksanaan pembayaran sehingga dari kemenkeu akan mencocokkan secara sistem”.

Aplikasi web E-Rekon dan LK merupakan perangkat lunak berbasis web dikembangkan untuk proses rekonsiliasi data transaksi keuangan serta penyusunan laporan keuangan kementerian negara/lembaga dan dibuat oleh Direktorat Jenderal Pembendaharaan Kementerian Keuangan. Pada periode yang telah ditetapkan, satuan kerja mengunggah data dari aplikasi SAIBA ke e-Rekon dan LK memakai user masing-masing. Selanjutnya data diproses oleh sistem untuk dapat dihasilkan Laporan Hasil Rekonsiliasi (LHR) yang dapat diunduh oleh satuan kerja.

Gambar 4.6
Aplikasi Web e-Rekon & LK



Sumber: Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar

Adapun proses kerja dari aplikasi web e-Rekon dan LK sebagai berikut:

- 1) E-Rekon dan LK dapat memudahkan satuan kerja untuk melakukan rekonsiliasi secara mandiri darimana saja dan kapan saja sepanjang masih merupakan periode rekonsiliasi.
- 2) Integritas data karena jika ada data yang berbeda akan segera diketahui semua pihak terkait
- 3) Mempercepat proses konsolidasi laporan keuangan untuk tingkat Wilayah, Eselon 1 dan K/L. Konsolidasi terjadi dengan cepat karena tidak ada lagi proses kirim data, terima data dan validasi data satker, Laporan keuangan cukup diunduh dari aplikasi e-Rekon dan LK
- 4) Memonitoring data dengan lebih cepat serta mudah dikarenakan aplikasi e-Rekon dan LK telah memiliki fitur-fitur mendukung realisasi dari laporan keuangan.

Demikian dari analisis hasil penelitian yang didapatkan dalam unsur laporan keuangan pada PSAP paragraf 60 disebutkan bahwa laporan keuangan pemerintah terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran, laporan finansial dan catatan atas laporan keuangan. Pada laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih. Laporan finansial terdiri dari Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, serta Laporan Arus Kas. Dan catatan atas laporan keuangan yang merinci dan menjelaskan lebih lanjut dari pos laporan pelaksanaan anggaran dan finansial. Sehingga pada penyajian laporan keuangan pada kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar telah disesuaikan dalam ketentuan dan standar yang berlaku dalam PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintah berbasis akrual dan untuk mendukung pelaporan keuangannya telah dilakukannya berbagai upaya dalam meningkatkan kinerja dan kualitas sumber daya manusia/karyawan/pegawai bagian keuangan kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Makassar. Dan dalam laporan keuangannya juga yang menggunakan sistem aplikasi yang terintegrasi satu sama lain.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Sesuai dengan hasil kegiatan penelitian oleh peneliti berdasarkan dengan hasil temuan dan analisis data pada pembahasan tersebut, sehingga peneliti bisa menarik kesimpulan dari penelitian “Analisis Penerapan PP No. 71 Tahun 2010 Berbasis AkruaI Terhadap Penyajian Laporan Keuangan Pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar” sebagai berikut:

1. Pada penyusunan dan penyajian laporan keuangan kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan berdasarkan aturan pengelolaan keuangan yang baik di lingkungan pemerintah. Peneliti mendapati bila tidak semua dari bagian laporan keuangan dituang didalam PP No. 71 Tahun 2010 ditemukan. Beberapa komponen laporan keuangan dimaksud tidak ditemukan dikarenakan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) didalamnya bagian dari laporan anggaran dan Laporan Arus Kas yang adalah bagian yang terdapat dalam laporan finansial.
2. Pada kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar, terdapat 2 (dua) faktor pendukung dalam penyajian laporan keuangannya yaitu sumber daya manusia dan perangkat teknis seperti perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*). Pada sumber daya manusianya, telah terus dilakukan upaya agar para pegawai memiliki kemampuan pemahaman yang baik salah satunya yaitu dengan mengikuti pelatihan – pelatihan yang diselenggarakan dan juga tetap

menjaga hubungan vertikal antar sesama pegawai kantor. Sedangkan dalam satuan perangkat teknis, telah mengikuti aturan yang berlaku dalam menggunakan sistem akuntansi yang diberlakukan yaitu SIMAK-BMN, SAIBA, serta e-Rekon & LK

5.2 Saran

Didalam penelitian ini hanya difokuskan terhadap analisis yang didapat langsung oleh peneliti yang dilakukan dari hasil wawancara, pengamatan secara langsung serta dokumentasi terhadap hasil laporan keuangan yang disajikan pada kantor Kanim. Selain itu, penelitian tersebut hanya berfokus salah satu bagian dari kantor tersebut sehingga dari segi data yang ditampilkan memiliki keterbatasan generalisasi. Sehingga disarankan untuk peneliti selanjutnya harus memperluas membahas dan wawasan dari objek penelitian akuntansi pemerintah.

Adapun kendala – kendala yang peneliti hadapi pada masa pandemic ini, yaitu dari PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) maupun WFH (*Work From Home*) sehingga adanya keterbatasan dari peneliti untuk melakukan penelitian di tempat atau di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar juga berdampak pada pengambilan data yang menyangkut penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliyah, S., & Nahar, A. (2012). AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN JEPARA Siti Aliyah Aida Nahar. *Jurnal Akuntansi & Auditing*, 8(2), 97–189.
- BAPEPAM. (2003). *Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP/36.PMK.2003 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala*. 1–6.
- BPK. (2005). *Peraturan Pemerintah Republik Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah*. 1–8.
[http://www2.pom.go.id/public/hukum_perundangan/pdf/Pengamanan rokok bagi kesehatan.pdf](http://www2.pom.go.id/public/hukum_perundangan/pdf/Pengamanan%20rokok%20bagi%20kesehatan.pdf)
- Dr.farida Nugrahani, M. H. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. 1(1), 305. <http://ejournal.usd.ac.id/index.php/LLT%0Ahttp://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/viewFile/11345/10753%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.758%0Awww.iosrjournals.org>
- Fakhrurazi. (2010). *Standar Akuntansi Pemerintah*.
<http://fakhrurazypi.wordpress.com/tag/standar-akuntansi-pemerintah/>
- Febriansyah, A. (2017). Tinjauan Atas Proses Penyusunan Laporan Keuangan Pada Young Entrepreneur Academy Indonesia Bandung. *Jurnal Riset Akuntansi*, 8(2).
<https://doi.org/10.34010/jra.v8i2.525>
- Hoesada, D. J. (2007). TEORI KEAGENAN. *Journal of Experimental Psychology: General*, 136(1), 23–42.
- IPSASB. (2011). *Transition to the Accrual Basis of Accounting: Guidance for Guidance for Public Sector* (Issue January).
<https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IPSASB-study-14-3e.pdf>
- Jannaini, Y. (2012). *PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA Survei pada Dinas Kota Bandung*. Komputer Indonesia.
- Jensen, M., & Meckling, W. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure. *The Economic Nature of the Firm: A Reader, Third Edition*, 283–303. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511817410.023>
- KSAP. (2009). Komite Standar Akuntansi Pemerintah. *Standart Akuntansi Pemerintah*

No. 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan BLU.

- Kusuma, A., Mus, A. R., & Lannai, D. (2020). Journal of Accounting and Finance. *Accounting and Finance*, 1(2), 168–193. HTTP
- Lauma, E. B., Morasa, J., & Kalangi, L. (2012). *ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH TERHADAP ASET TETAP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW*. 32.
- Lunenburg, F. C. (2012). Compliance Theory and Organizational Effectiveness. *International Journal of Scholarly Academic Intellectual Diversity*, 14(1), 1–4. [http://nationalforum.com/Electronic Journal Volumes/Lunenburg, Fred C Compliance Theory and Organizational Effectiveness IJSAID V14 N1 2012.pdf](http://nationalforum.com/Electronic%20Journal%20Volumes/Lunenburg,%20Fred%20C%20Compliance%20Theory%20and%20Organizational%20Effectiveness%20IJSAID%20V14%20N1%202012.pdf)
- Mahmudi. (2011). *Akuntansi Sektor Publik*. UII Press 2016.
- Mehrolhassani, M. H. ossie., Khayatzaadeh-Mahani, A., & Emami, M. (2015). Implementation status of accrual accounting system in health sector. *Global Journal of Health Science*, 7(1), 24–34. <https://doi.org/10.5539/gjhs.v7n1p24>
- PSAP. (2010). *Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010*. 1–413. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Rahmawati, N., Made, A., & Yogivaria, D. (2016). Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua di Sekretariat DPRD Kabupaten Malang Berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi Unikama*, 4(1).
- Rina, & Kusuma, A. H. P. (2017). *Pengaruh Kompetensi Budaya Organisasi dan Motivasi Terhadap Kinerja Dosen Perguruan Tinggi Swasta di Kota Makassar*. 3, 2–14. <https://doi.org/10.31219/osf.io/67n8g>
- Santoso, U., & Pambelum, Y. J. (2008). Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Mencegah Fraud Urip. *Administrasi Bisnis*, 4(1), 14–33.
- Sukamto. (2015). *Rekayasa Perangkat Lunak*.
- Susilowati. (2004). Studi Empiris Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Jakarta. In *Studi Empiris Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Jakarta* (Vol. 13, Issue 1, pp. 66–80). <https://doi.org/10.14710/jbs.13.1.66-80>
- Sutono. (2014). *Perangkat Keras Komputer Dan Tool ' s Pendukungnya Pokok*

Bahasan.

Yuningsih, A. T. (2018). *EVALUASI PENERAPAN PP NO. 71 TAHUN 2010 TENTANG SAP BERBASIS AKRUAL DALAM PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN POLITEKNIK KESEHATAN MAKASSAR*. Islam Negeri Alauddin Makassar.

DAFTAR LAMPIRAN

Pertanyaan

- a. Mengenai Perusahaan:
 1. Sejak kapan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar berdiri?
 2. Apa tujuan dari didirikannya Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar?
 3. Apa fokus kegiatan dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar?
 4. Bagaimana pengurusan keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar?
 5. Bagaimana upaya dalam meningkatkan pelayanan pengurusan keimigrasian?
- b. Mengenai Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual:
 1. Apakah dalam penyusunan laporan keuangan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual?
 2. Bagaimanakah laporan yang diterapkan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar dalam menyusun laporan keuangannya?
 3. Bagaimana dan kapan pengakuan dari aset/persediaan serta bagaimana pengakuannya dalam laporan keuangan?
 4. Bagaimana dan kapan pengakuan pendapatan serta bagaimana pengungkapannya?
 5. Bagaimana dan kapan pengakuan beban dan utang serta bagaimana pengungkapannya?
 6. Bagaimana pengakuan dan pengukuran serta metode penyusutan yang digunakan dalam aset tetap?
- c. Mengenai faktor pendukung penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual:
 1. Bagaimana tingkat pemahaman dari sumber daya manusia pada penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual?
 2. Apakah masih dilakukannya pelatihan – pelatihan sebagai penunjang sumber daya manusia untuk meningkatkan dan memperoleh kualitas laporan keuangan?
 3. Apakah latar belakang pendidikan dominan dalam menentukan keberhasilan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual?
 4. Bagaimana efesiensi komunikasi hubungan vertikal (diantara pimpinan dan karyawan) sehubungan dengan penyajian laporan keuangan yang berbasis akrual?
 5. Aplikasi akuntansi apa yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan?
 6. Apakah aplikasi akuntansi yang digunakan dapat terintegrasi atau tidak dengan aplikasi pendukung lainnya?

Lampiran II

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2020 Dan 2019

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2020 DAN 2019 (DALAM RUPIAH)									
KEMENTERIAN LEMBAGA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI (013) ESelon I DIREKSI MIGRASI 06 WILAYAH/PROVINSI SULAWESI SELATAN 1900 SATUAN KERJA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MAKASSAR 408216									
Kode LRA : LRA.F.5 Tanggal : 28/07/20 15:57 PM Halaman : 1 Prg ID : lap_lra_sas_sas_komparasi -									
NO	URAIAN	2020			2019			REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH								
	PENERIMAAN PERPAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	19,243,992	(16,243,992)	0	10,749,405	(10,749,405)	0	0
	PENERIMAAN HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	0	19,243,992	(16,243,992)	0	10,749,405	(10,749,405)	0	0
B	BELANJA								
	BELANJA PEGAWAI	5,758,818,000	3,338,098,817	2,420,721,183	58	5,185,842,000	1,945,711,154	63	
	BELANJA BAKANG	7,626,109,000	2,183,561,112	5,432,547,888	28	6,339,714,000	4,321,965,990	32	
	BELANJA MODAL	273,683,000	148,064,500	125,968,500	54	351,539,000	351,539,000	0	
	BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA SUBSIDI	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA BANTUAN SOSIAL	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA LAIN-LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA (B1 + B II)	13,658,590,000	5,670,722,429	7,978,887,571	42	11,887,085,000	6,619,217,538	44	
C	PEMBAYARAN								

Lampiran III

Neraca Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2020 Dan 2019

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER JUNI 2020 DAN 2019
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013
ORGANISASI : 06
JAPPAW : 013061900KD BA(013) ES1(06) SULAWESI SELATAN
KE SATKER : 408216

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
DITJEN IMIGRASI
KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MAKASSAR

Tgl. Cetak 29/07/2020 2:48 AM
lap_neraca_satker_komparatif --rekon17

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2020	2019	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	210,000,000	0	210,000,000	0.00
Persediaan	1,064,967,783	1,736,970,221	(672,002,438)	(38.69)
JUMLAH ASET LANCAR	1,274,967,783	1,736,970,221	(462,002,438)	(26.60)
ASET TETAP				
Tanah	36,418,556,000	36,418,556,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	18,957,833,581	18,436,613,081	521,220,500	2.83
Gedung dan Bangunan	10,885,893,000	10,885,893,000	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	40,810,243	40,810,243	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(17,994,614,534)	(17,086,466,930)	(908,147,604)	5.32
JUMLAH ASET TETAP	48,308,478,290	48,695,405,394	(386,927,104)	(0.79)
LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	15,516,240	15,516,240	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN AMORTISASI ASET LAINNYA	(2,413,664)	(1,594,736)	(818,928)	51.35
JUMLAH ASET LAINNYA	13,102,576	13,921,504	(818,928)	(5.88)
JUMLAH ASET	49,596,548,649	50,446,297,119	(849,748,470)	(1.68)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
pendapatan Diterima Dimuka	0	26,025,830	(26,025,830)	(100.00)
ang Muka dari KPPN	210,000,000	0	210,000,000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	210,000,000	26,025,830	183,974,170	706.89
JUMLAH KEWAJIBAN	210,000,000	26,025,830	183,974,170	706.89
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	49,386,548,649	50,420,271,289	(1,033,722,640)	(2.05)
JUMLAH EKUITAS	49,386,548,649	50,420,271,289	(1,033,722,640)	(2.05)
JUMLAH EKUITAS	49,386,548,649	50,420,271,289	(1,033,722,640)	(2.05)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	49,596,548,649	50,446,297,119	(849,748,470)	(1.68)

Lampiran IV

Laporan Operasional Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2020 Dan 2019

LAPORAN OPERASIONAL TINGKAT SATUAN KERJA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2020 DAN 2019 (dalam rupiah)				
KEMENTERIAN SELON I WILAYAH/PROVINSI SATUAN KERJA ENIS SATUAN KERJA	: 013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	Kode Lap	: LO.SAT
	: 06	DITJEN IMIGRASI	Tanggal	: 29/07/20 2:48 AM
	: 1900	SULAWESI SELATAN	Halaman	: 1
	: 408216	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MAKASSAR	Prg ID	: lap_lo_satker --
		: KD	Tgl Data : 20/05/19 12:00 AM	
URAIAN	2020	2019	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	0
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	0
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	0
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	0
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	0
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	0
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	0
Pendapatan Cukai	0	0	0	0
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	0
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	0
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	0
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	0
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	36,944,222	10,749,405	26,194,817	243.686
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	36,944,222	10,749,405	26,194,817	243.686
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	0
Pendapatan Hibah	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan	36,944,222	10,749,405	26,194,817	243.686
KEBAN OPERASIONAL	0	0	0	0
Beban Pegawai	3,338,096,817	3,183,883,452	154,213,365	4.844
Beban Pensiunan	2,171,955,965	3,161,754,686	(989,798,721)	(31.305)
Beban Barang dan Jasa	1,476,812,398	1,144,754,677	332,057,721	29.007
Beban Pemeliharaan	255,136,966	391,796,866	(136,659,900)	(34.86)
Beban Perjalanan Dinas	127,629,400	291,361,865	(163,732,465)	(56.196)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	0
Beban Bunga	0	0	0	0
Beban Subsidi	0	0	0	0
Beban Hibah	0	0	0	0

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2020 DAN 2019

(dalam rupiah)

KEMENTERIAN
 KELON I
 ILAYAH/PROVINSI
 TUAN KERJA
 NIS SATUAN KERJA

: 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 : 06 DITJEN IMIGRASI
 : 1900 SULAWESI SELATAN
 : 408216 KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MAKASSAR
 : KD

Kode Lap : LO.SAT
 Tanggal : 29/07/20 2:48 AM
 Halaman : 2
 Prg ID : lap_lo_satker -

Tgl Data : 20/05/19 12:00 AM

URAIAN	2020	2019	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	868,974,731	1,094,415,686	(225,440,955)	(20.599)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Lain Lain	0	0	0	
JMLAH BEBAN	8,238,606,277	9,267,967,232	(1,029,360,955)	(11.107)
PLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(8,201,662,055)	(9,257,217,827)	1,055,555,772	(11.403)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	7,528,159	11,187,816	(3,659,657)	(32.711)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	13,985,233	14,626,304	(641,071)	(4.383)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	6,457,074	3,438,488	3,018,586	87.788
JMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	7,528,159	11,187,816	(3,659,657)	(32.711)
PLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(8,194,133,896)	(9,246,030,011)	1,051,896,115	(11.377)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
PLUS/DEFISIT - LO	(8,194,133,896)	(9,246,030,011)	1,051,896,115	(11.377)

Lampiran V

Laporan Perubahan Ekuitas Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2020 Dan 2019

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS TINGKAT SATKER UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2020 DAN 2019 (dalam rupiah)				
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI SESEKSI : 06 DITJEN IMIGRASI WILAYAH/PROVINSI : 1900 SULAWESI SELATAN JENIS SATUAN KERJA : KD SATUAN KERJA : 408216 KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MAKASSAR				
Kode Lap : LPE.SATKER Tanggal : 29/07/20 1:58 PM Halaman : 1 Prg ID : lap_lpe_satker --rekon17				
URAIAN	2020	2019	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	50,420,271,289	49,505,695,797	914,575,492	-
KURPLUS/DEFISIT-LO	(8,194,133,896)	(9,246,030,011)	1,051,896,115	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	0	0	0	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	-
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	-
LIAN-LAIN	0	0	0	-
PANSAKSI ANTAR ENTITAS	7,160,411,256	9,800,040,156	(2,639,628,900)	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(1,033,722,640)	554,010,145	(1,587,732,785)	-
EKUITAS AKHIR	49,386,548,649	50,059,705,942	(673,157,293)	-